



**Kementerian Kelautan dan Perikanan**  
Republik Indonesia

# Capaian Kinerja

**Kementerian Kelautan dan Perikanan**  
**Tahun 2020 – 2024**





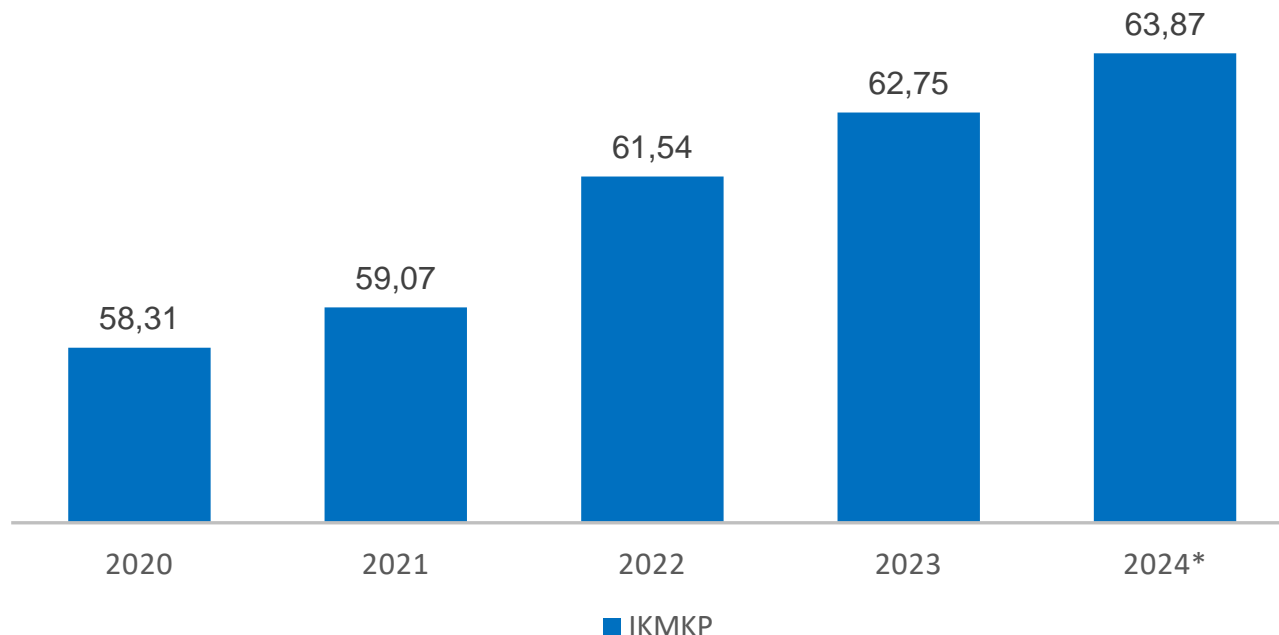
# Capaian Indikator Kinerja

## Sasaran Strategis 1. Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat



# 1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Satuan : Indeks

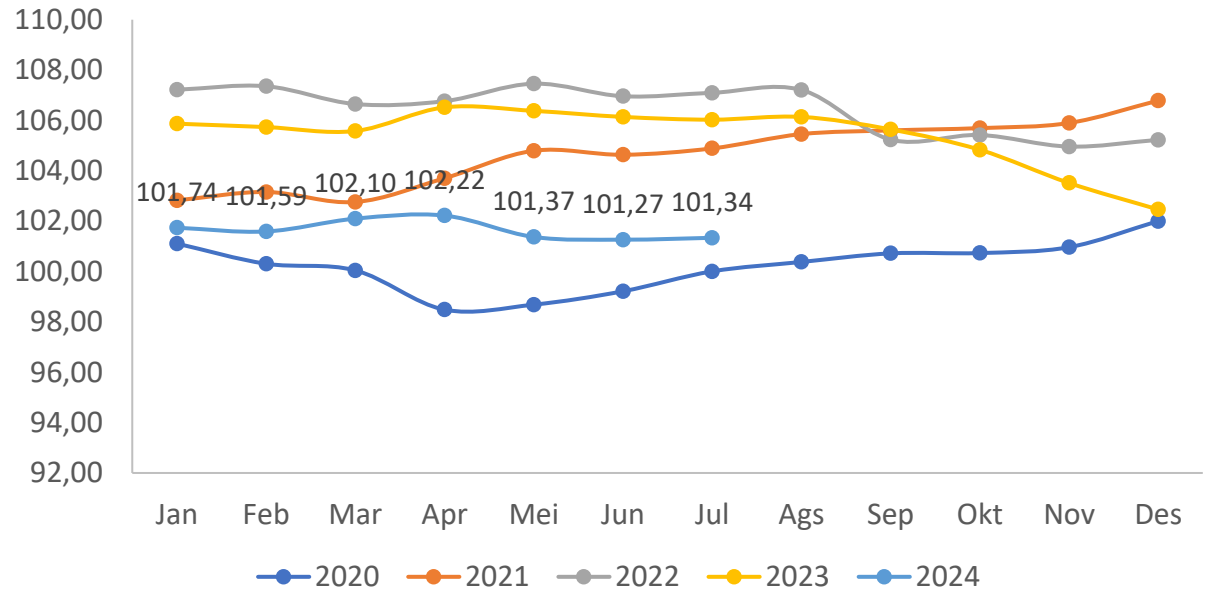
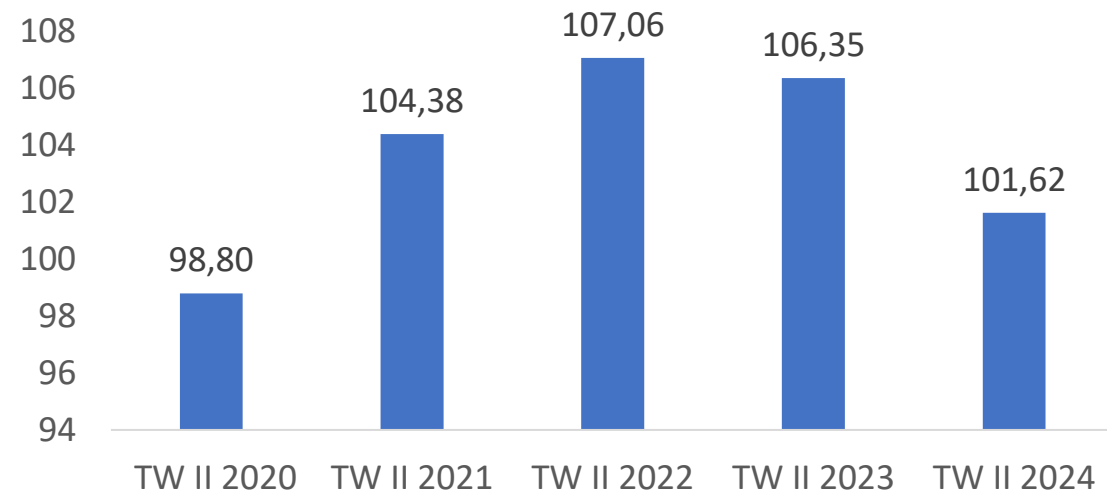
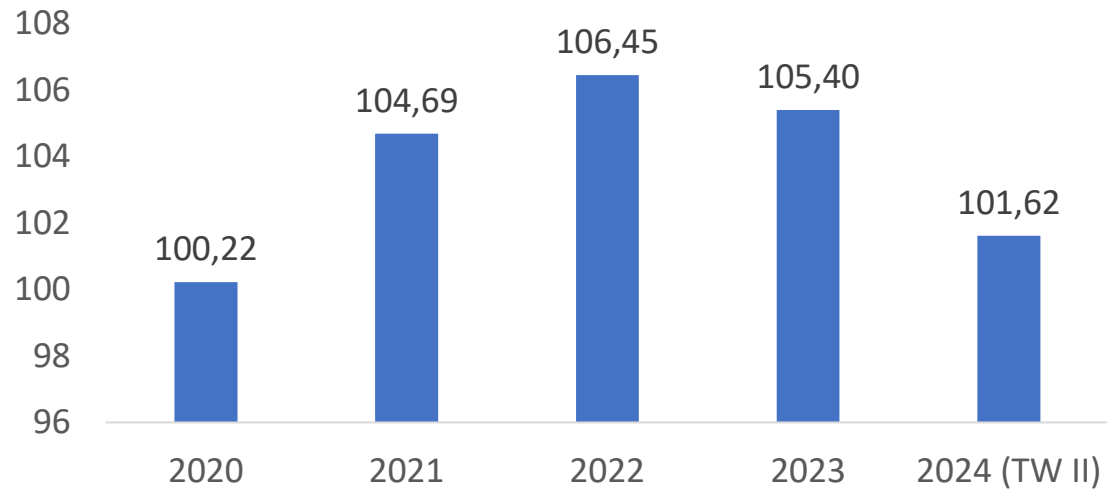


- Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP (IKMKP) adalah indeks untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan (KP) di Indonesia. IKMKP merupakan salah satu instrumen yang dipergunakan untuk menentukan fokus program KKP dalam meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, serta mengoptimalkan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam pencapaian target kebijakan/program KKP yang terdiri dari dimensi sosial dan dimensi ekonomi.
- Indeks Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yaitu dari 58,31 di tahun 2020 menjadi 62,75 di tahun 2023 dan terus ditargetkan naik di tahun 2024 sebesar 63,87.
- Sepanjang tahun 2020-2023 IKMKP tumbuh positif rata-rata sebesar 2,48 persen.
- Target IKMKP tahun 2024 sebesar 63,87.

Sumber : Balai Riset Kelautan dan Perikanan, KKP  
Tahun 2024 merupakan angka target



# Rata-Rata Nilai Tukar Nelayan (Indeks)

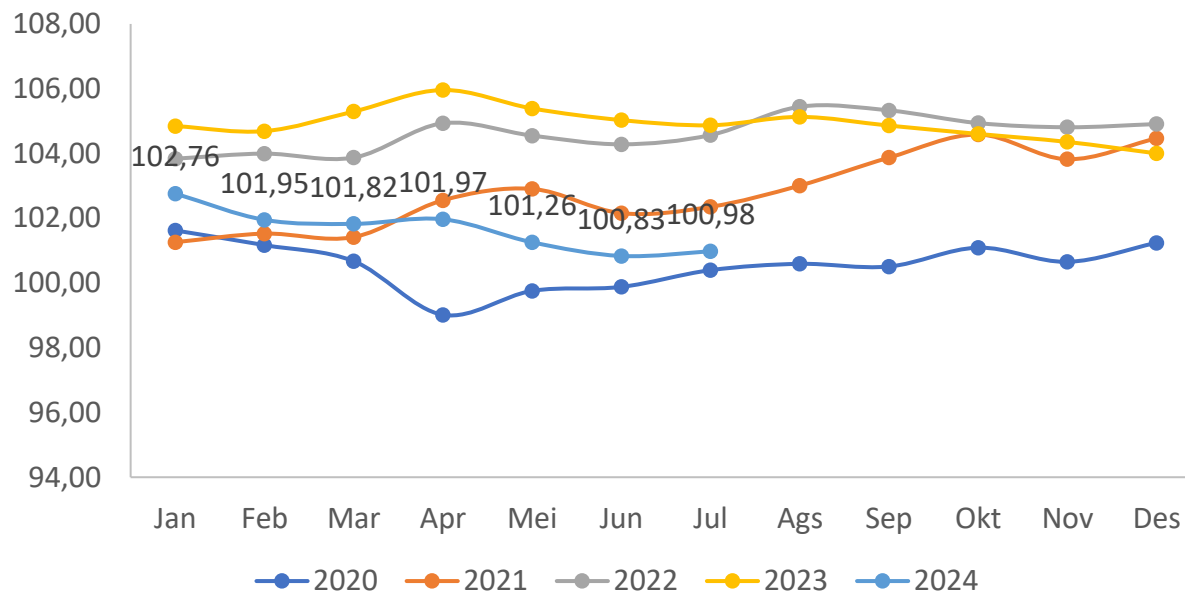
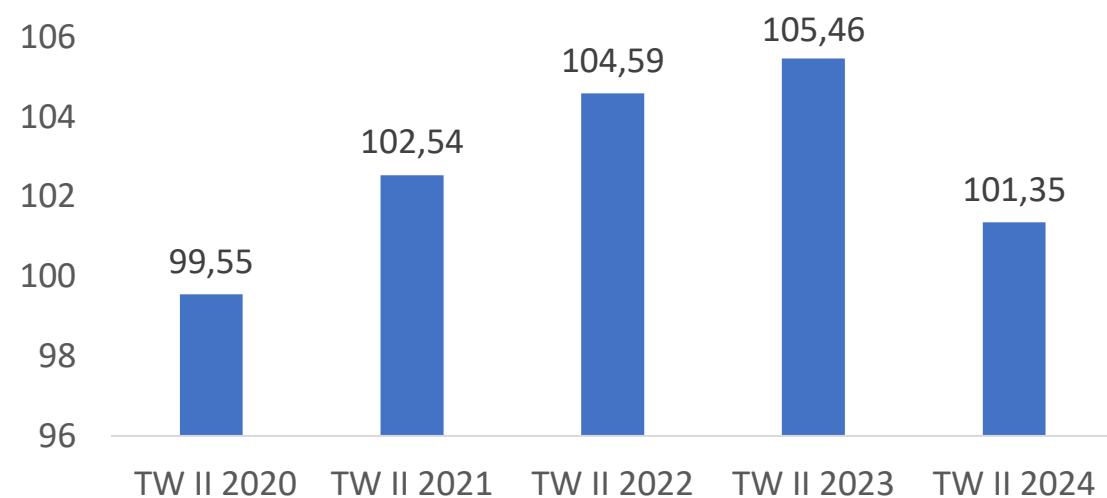
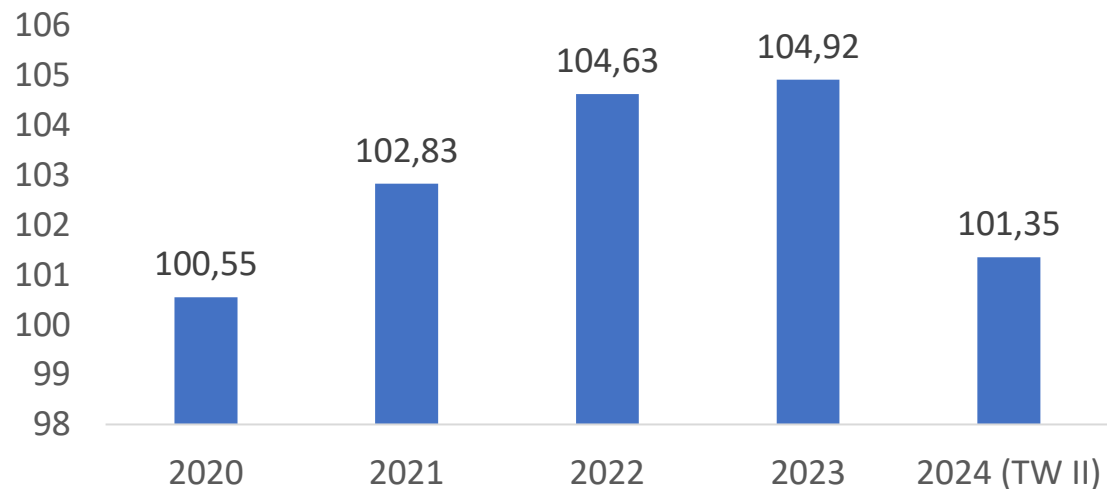


- Nilai Tukar Nelayan menunjukkan daya beli para pelaku usaha perikanan. Nilai Tukar Nelayan berfluktuatif di tahun 2020-2023, namun tumbuh positif sebesar 1,7 persen. Nilai Tukar Nelayan di Tahun 2020 cenderung mengalami penurunan disebabkan adanya pandemi covid di tahun 2020, namun berangsur meningkat di tahun 2021, 2022, dan 2023.
- Pada Juli 2024, NTN naik sebesar 0,07 persen. Hal ini terjadi karena penurunan It sebesar 0,18 persen lebih kecil dari penurunan Ib sebesar 0,25 persen. Penurunan It disebabkan oleh turunnya It pada kelompok penangkapan di laut (khususnya komoditas ikan tongkol dan ikan selar) sebesar 0,12 persen. Sedangkan kelompok penangkapan di perairan umum mengalami kenaikan (khususnya komoditas ikan belut) sebesar 0,69 persen. Penurunan Ib sebesar 0,25 persen disebabkan oleh penurunan Indeks Kelompok Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) sebesar 0,50 persen, sedangkan Indeks Kelompok BPPBM naik sebesar 0,06 persen.

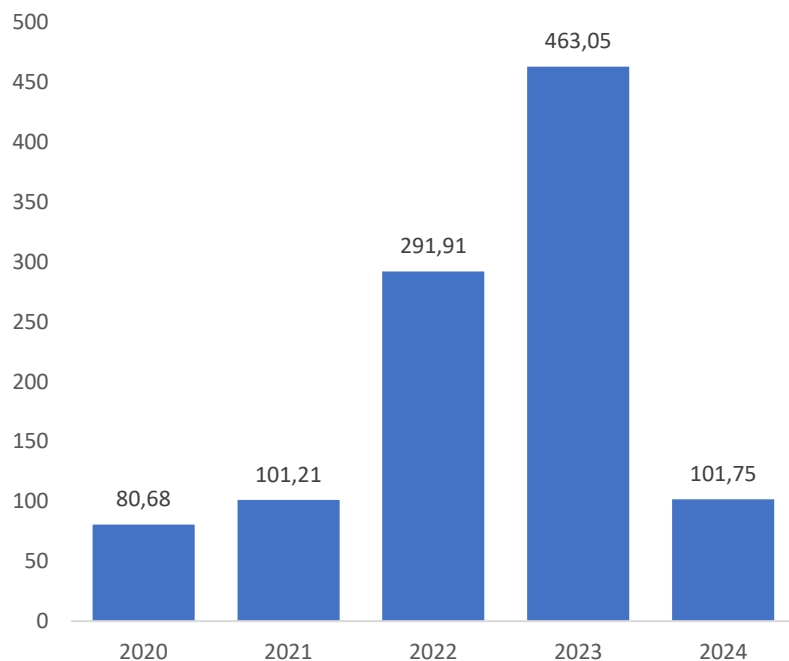




# Rata-Rata Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (Indeks)



- Nilai Tukar Pembudidaya Ikan menunjukkan daya beli para pelaku usaha perikanan. Nilai Tukar Pembudidaya ikan cenderung berfluktuatif di tahun 2020-2023, namun tumbuh positif sebesar 1,43 persen. Nilai Tukar Pembudidaya di Tahun 2020 cenderung mengalami penurunan disebabkan adanya pandemi covid di tahun 2020, namun berangsur meningkat di tahun 2021, 2022, dan 2023.
- Pada Juli 2024, NTPi mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen. Hal ini terjadi karena penurunan It sebesar 0,08 persen lebih kecil dari penurunan Ib sebesar 0,22 persen. Penurunan It disebabkan oleh turunnya harga beberapa jenis komoditas, khususnya rumput laut dan ikan nila. Penurunan Ib sebesar 0,22 persen disebabkan oleh penurunan Indeks Kelompok Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) sebesar 0,45 persen dan Indeks Kelompok BPPBM sebesar 0,02 persen.

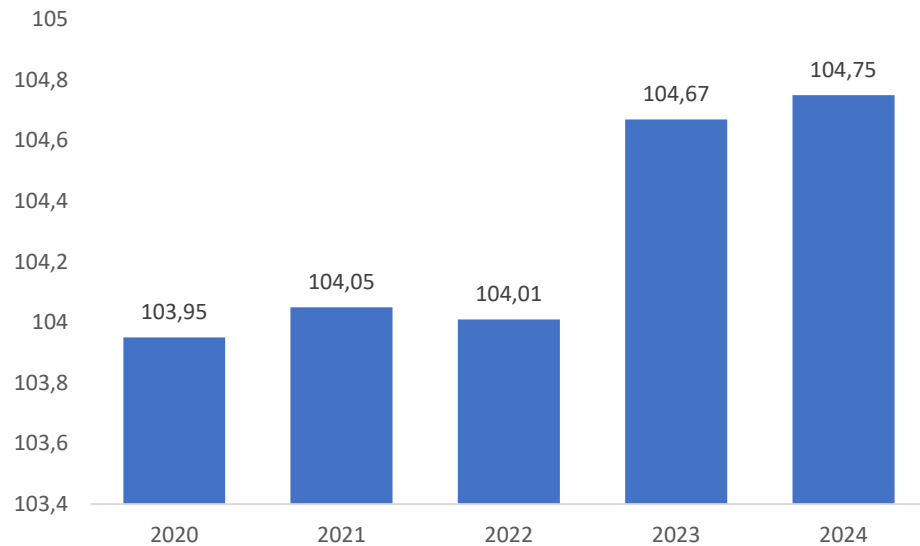


2024 : angka target

- NTPG mengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, yang diperoleh melalui pelaksanaan survei harga NTPG.
- Realisasi NTPG pada Tahun 2023 sebesar 463,05 atau mencapai 456,21% dari target Tahun 2023 yaitu 101,5.
- NTPG di tahun 2020 sebesar 80,68 menjadi sebesar 463,05 di tahun 2023.



# Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)



2024 : angka target

- NTPHP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima rumah tangga pengolah hasil perikanan (It) dengan indeks harga yang dibayar rumah tangga pengolah hasil perikanan (Ib).
- NTPHP tahun 2023 telah mencapai 104,67.
- Capaian NTPHP di tahun 2020 sebesar 103,95 meningkat menjadi sebesar 104,67 di tahun 2023.

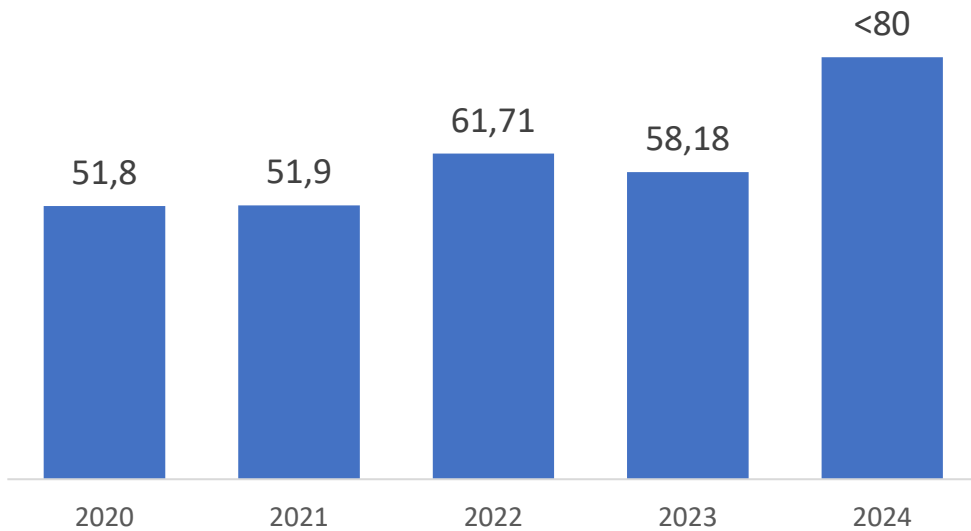


# Capaian Indikator Kinerja

## Sasaran Strategis 2. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan



## 2a. Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

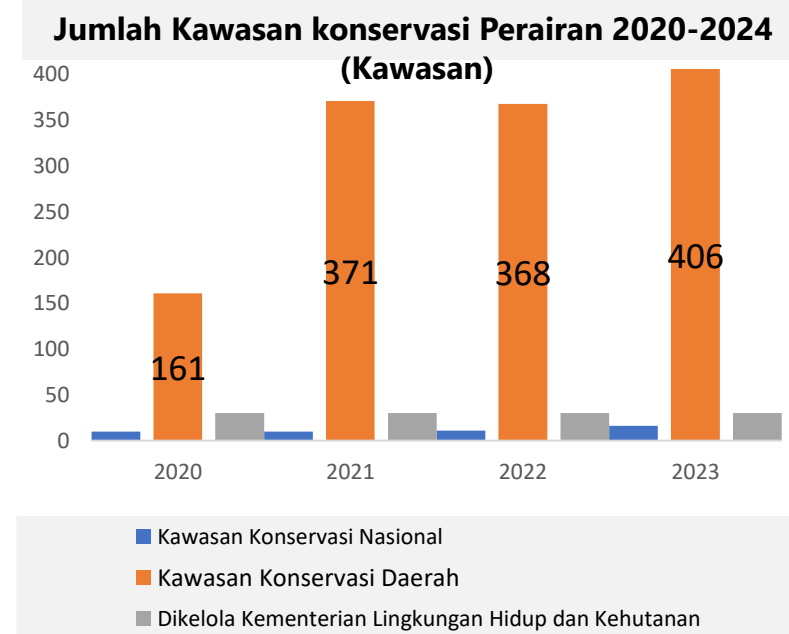
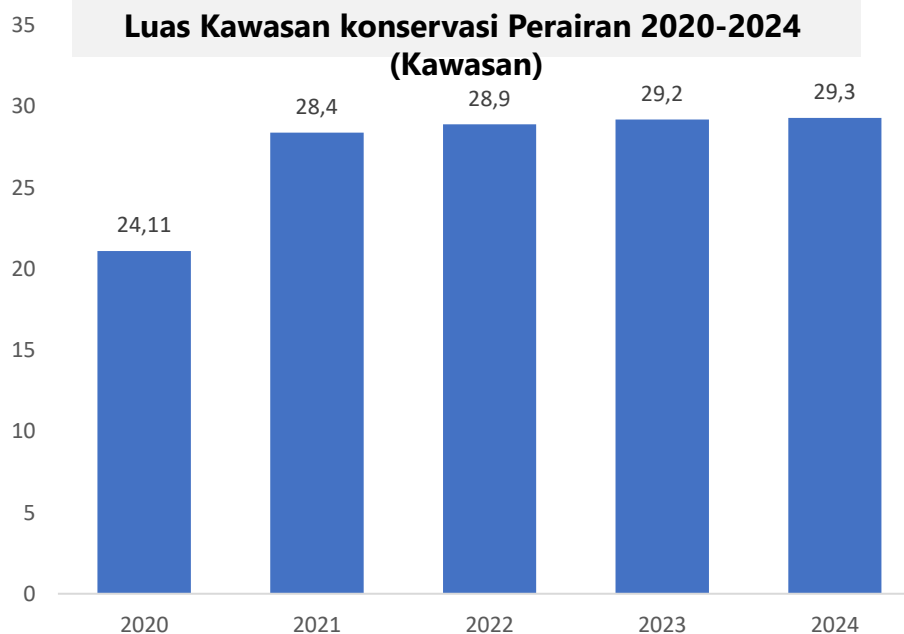


- Indikator ini mengukur sejauh mana kebijakan perikanan tangkap dalam melakukan pengelolaan perikanan di suatu WPPNRI atau jenis ikan tertentu.
- Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman dihitung dari jumlah volume produksi perairan laut pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah potensi sumber daya ikan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI.



## 2b. Luas Kawasan Konservasi

Pemerintah Indonesia menargetkan 10% atau 32,5 juta hektar wilayah perairan menjadi kawasan konservasi. Pada tahun 2023 capaian kawasan konservasi di Indonesia mencapai 29,2 juta hektar. Target ini merupakan komitmen Indonesia terhadap pencapaian *Aichi* dan *Sustainable Development Goal (SDG) 14* untuk melindungi keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan. Kawasan konservasi perairan terdiri dari Kawasan Konservasi Nasional, Kawasan Konservasi Daerah, Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



2024 : angka target

Luas Kawasan Konservasi meliputi Luas Kawasan Konservasi dalam dokumen rencana zonasi kawasan laut (RTRL, RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ WP-3-K, dan persetujuan materi teknis) yang ditetapkan sampai dengan 2024 dan/atau dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Luas Kawasan konservasi terus meningkat yaitu sebesar 24,11 juta hektar di tahun 2020 menjadi sebesar 29,2 juta hektar di tahun 2023.



# Capaian Indikator Kinerja

## Sasaran Strategis 3. Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan



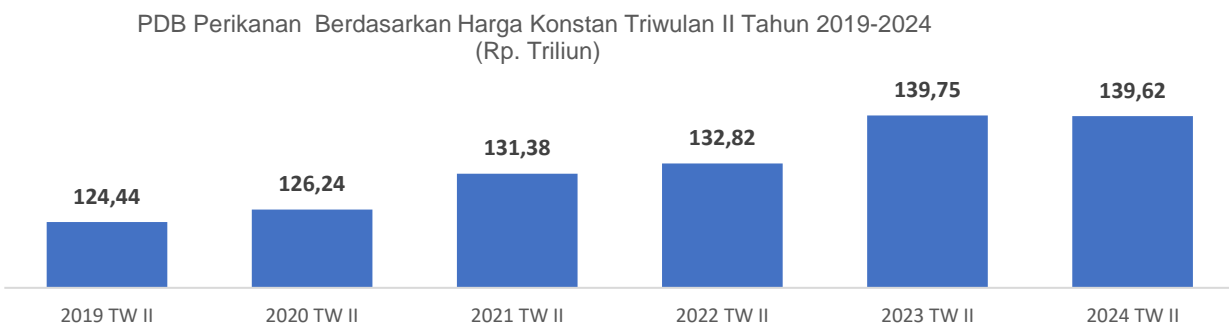
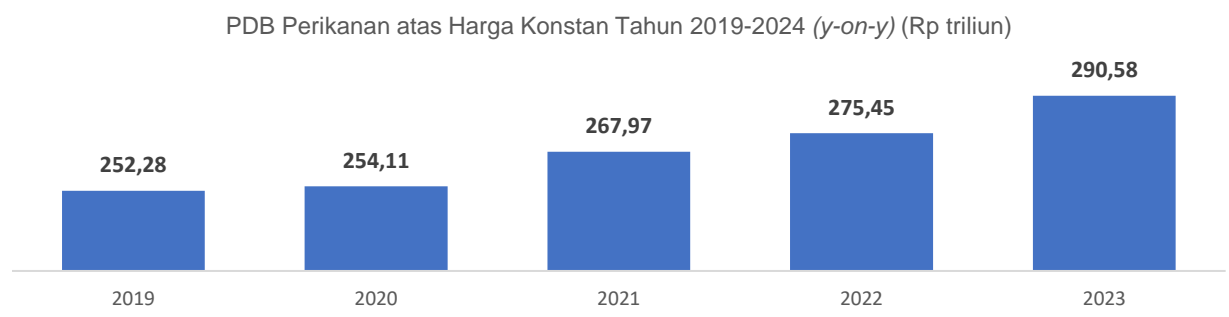


# 3a. Nilai PDB Perikanan (Rp Triliun)

## Tahun 2019 – Triwulan II Tahun 2024

- Pertumbuhan PDB Perikanan merupakan indikator yang menggambarkan besarnya perubahan ukuran perekonomian sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia (dalam persen) yang dihitung dengan cara membandingkan ukuran yang tercapai pada suatu periode dengan ukuran yang tercapai periode sebelumnya.
- Nilai PDB Perikanan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2023 sebesar Rp290,58 Triliun sedangkan PDB Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2023 sebesar Rp555,04 Triliun.
- Nilai PDB Perikanan ADHK Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp139,62 triliun sedangkan PDB Perikanan ADHB sebesar Rp264 Triliun.

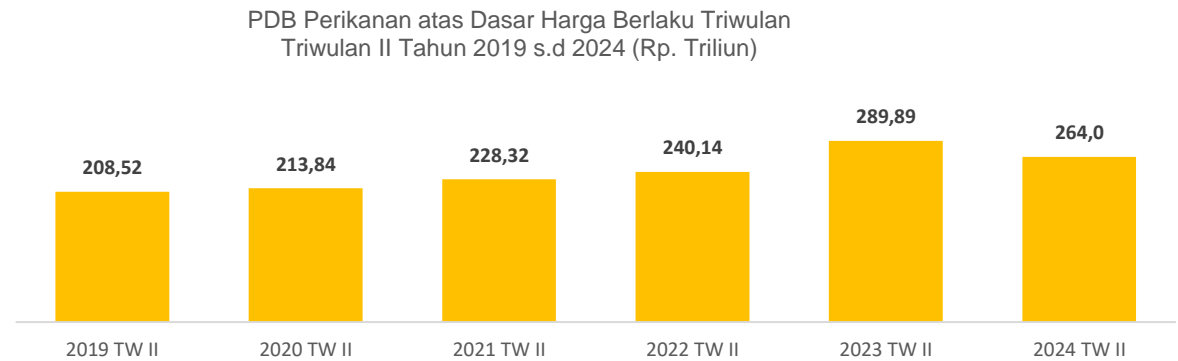
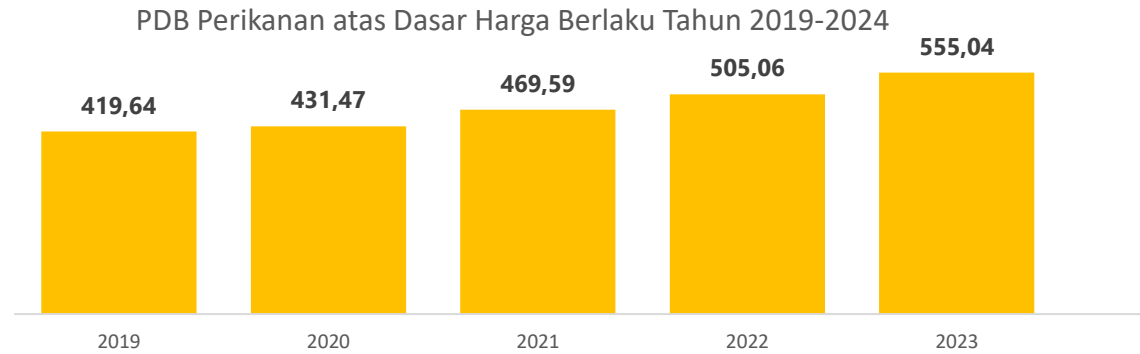
### PDB Perikanan Atas Harga Konstan



#### PDB Perikanan ADHK:

- Menggambarkan pertumbuhan riil sektor perikanan secara objektif.
- Tidak terpengaruh oleh perubahan harga dan inflasi.
- Digunakan untuk melihat pertumbuhan riil sektor perikanan dari tahun ke tahun.

### PDB Perikanan Atas Harga Berlaku



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

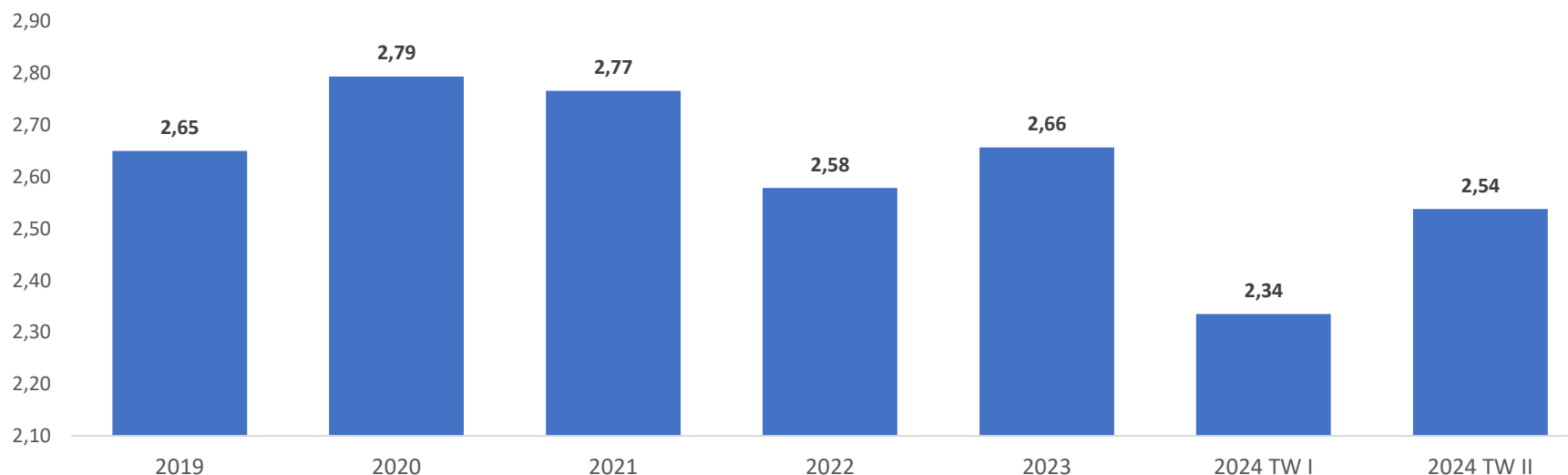
#### PDB Perikanan ADHB:

- Menggambarkan nilai ekonomi perikanan secara aktual pada tahun tersebut.
- Terpengaruh oleh perubahan harga dan inflasi.
- Digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi perikanan.



# Kontribusi PDB Perikanan terhadap PDB Nasional (%)

Tahun 2019 – Triwulan II Tahun 2024 (Atas Dasar Harga Berlaku)

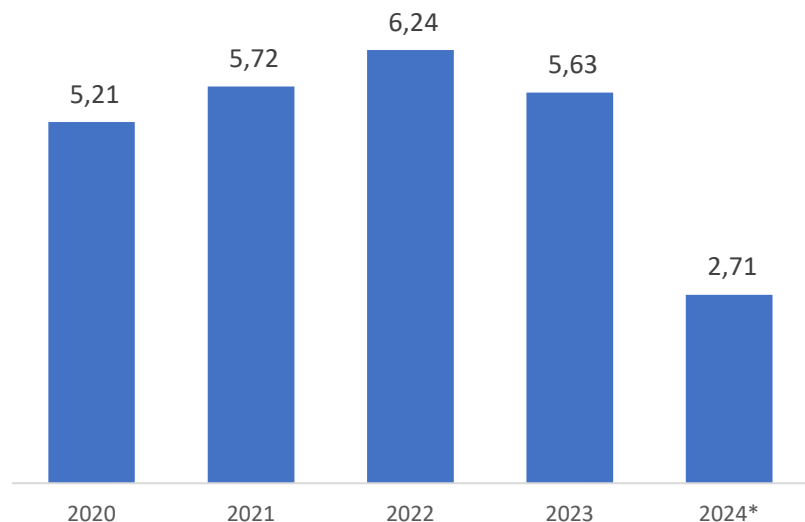


Kontribusi PDB Perikanan terhadap PDB Nasional Tahun 2023 sebesar 2,66 persen, atau lebih tinggi daripada Tahun 2022 (2,58 persen). Sedangkan pada TW II Tahun 2024 kontribusi PDB Perikanan sebesar 2,54 persen atau lebih tinggi dari TW I Tahun 2024 sebesar 2,34 persen.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024



## 3b. Kinerja Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)



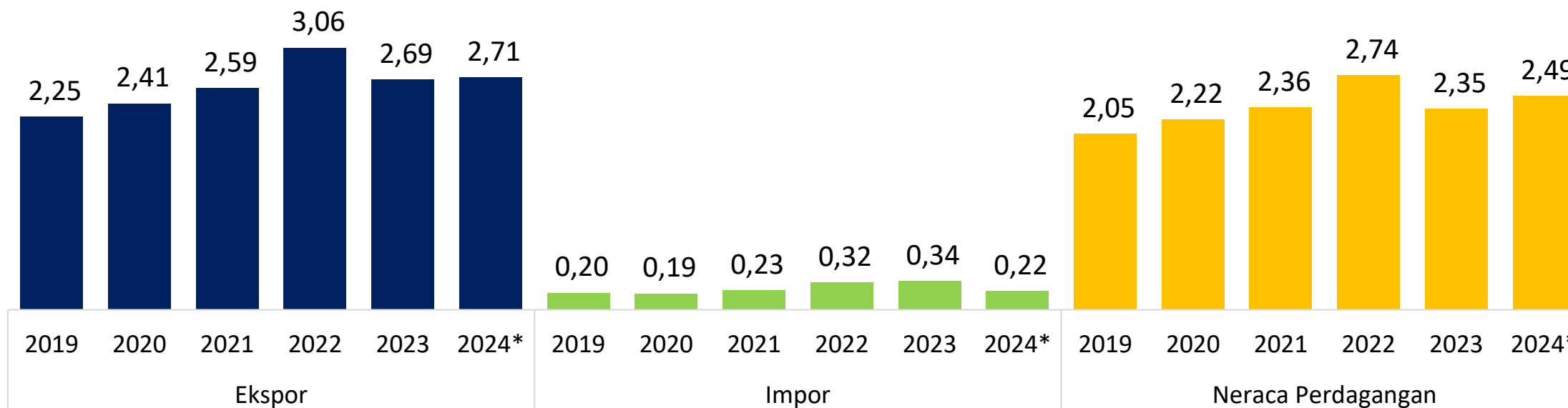
Tahun 2024 : Nilai Ekspor s.d triwulan II Tahun 2024

- Ekspor barang adalah seluruh barang yang dibawa keluar dari wilayah pabean (the custom frontier) Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut (BPS, 2019). Komoditas hasil perikanan adalah komoditas ikan yang ditangani, diolah, dan atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku dan olahan lainnya. Komoditas tersebut diklasifikasikan kedalam Harmonized System (HS) dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017.
- Jumlah kode HS yang diidentifikasi sebagai komoditas hasil perikanan sebanyak 480 produk.
- Nilai ekspor hasil perikanan terus meningkat yaitu sebesar 5,21 USD miliar di tahun 2020 menjadi 5,63 USD miliar di tahun 2023. Nilai Ekspor Hasil Perikanan triwulan II 2024 sebesar 2,71 USD miliar. Hal ini didukung dengan penguatan strategi pemasaran hasil perikanan Indonesia melalui diplomasi ekonomi dalam menyelesaikan hambatan tarif dan non tarif, pameran dan festival di dalam dan luar negeri.



# Kinerja Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)

#2024  
KKP BEYOND

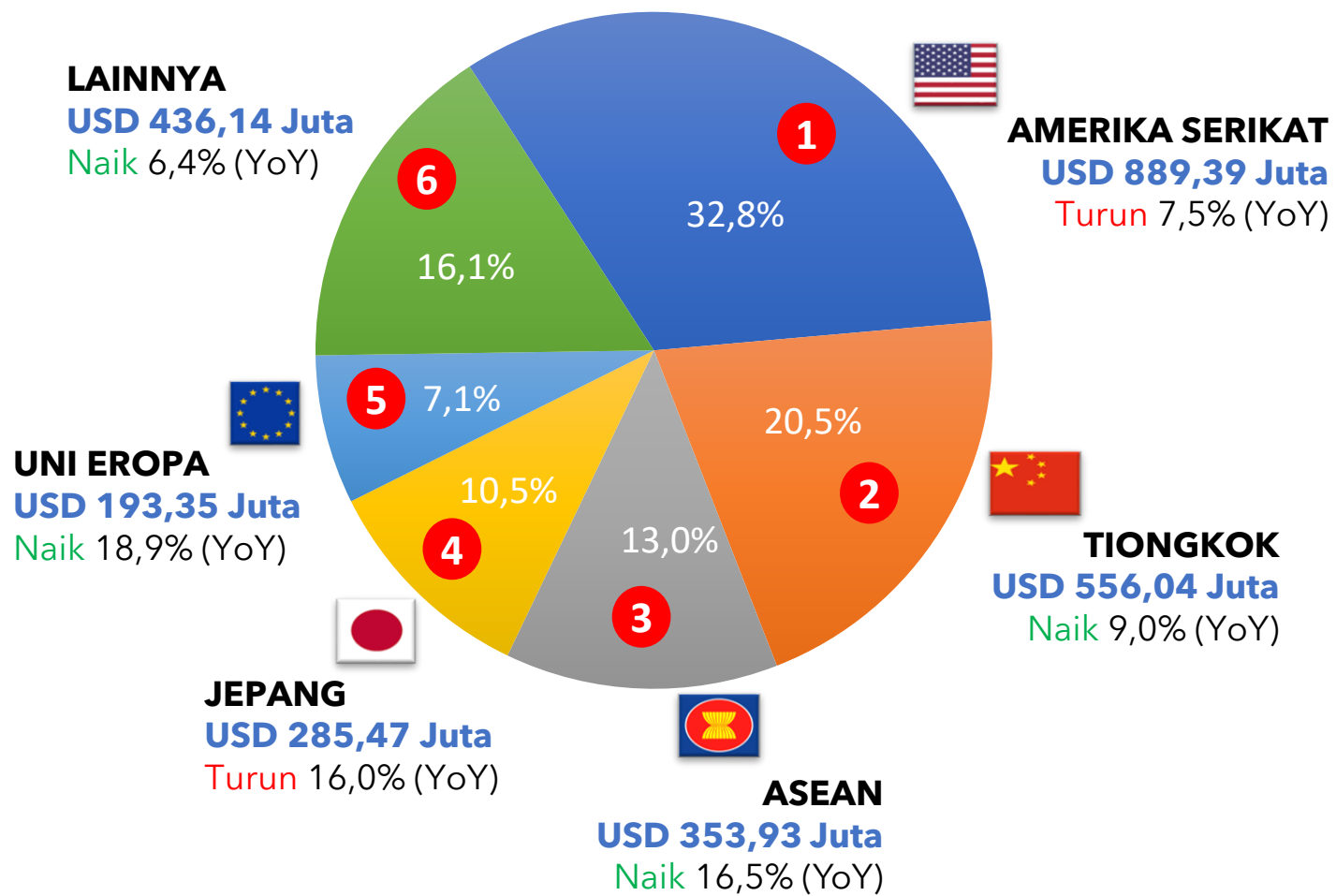


- Pada periode Januari-Juni 2024, **NILAI EKSPOR** produk perikanan Indonesia mencapai **USD 2,71 Miliar (Rp 44,24 Triliun)** atau **naik 1,0%** dibanding periode yang sama tahun 2023
- **NILAI IMPOR** periode Januari-Juni 2024 mencapai **USD 0,22 Miliar (Rp 3,58 Triliun)** atau sekitar 8,09% terhadap nilai ekspor, sehingga mengukuhkan Indonesia sebagai **negara net exporter produk perikanan**
- Pada periode Januari-Juni 2024 **NERACA PERDAGANGAN** produk perikanan mengalami **SURPLUS** sebesar **USD 2,49 Miliar (Rp 40,67 Triliun)** atau **naik 6,2%** dibanding periode yang sama tahun sebelumnya

Sumber: BPS Diolah Ditjen PDS-KKP (479 HS 2017 atau 507 HS 2022\*) s.d Juni 2024  
Kurs 1 Dollar : Rp. 16.300,-



# Negara Tujuan Ekspor Produk Perikanan Indonesia Periode Januari – Juni 2024

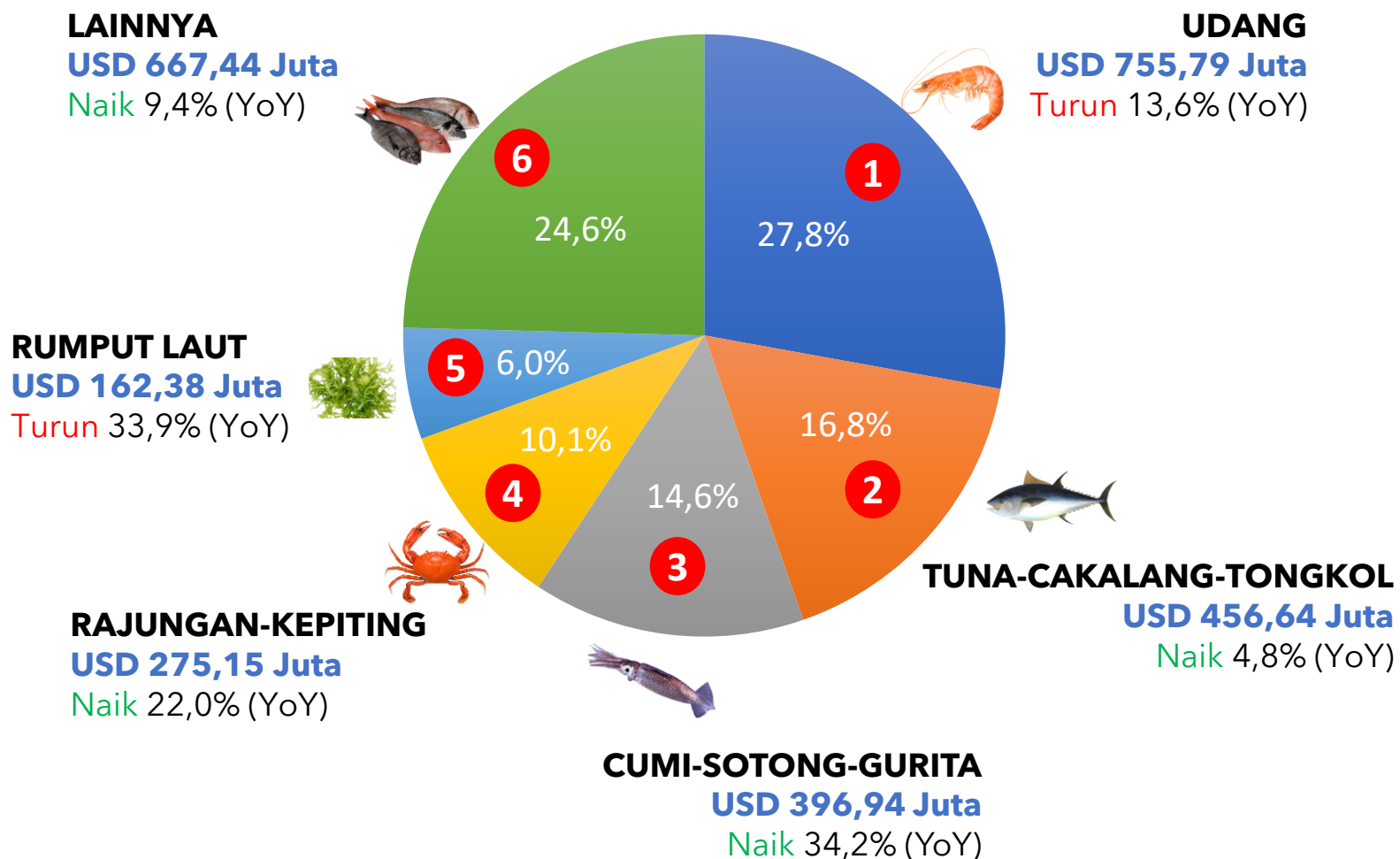


- **Amerika Serikat** masih menjadi negara utama tujuan ekspor produk perikanan Indonesia dengan nilai ekspor sebesar **USD 889,39 Juta**, selanjutnya diikuti **Tiongkok** sebesar **USD 556,04 Juta**, **ASEAN** sebesar **USD 353,93 Juta**, **Jepang** dengan nilai ekspor sebesar **USD 285,47 Juta**, dan **Uni Eropa** sebesar **USD 193,35 Juta**.
- Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023, **penurunan** ekspor terjadi pada ekspor ke **Amerika Serikat** dan **Jepang**, sedangkan ekspor ke **Tiongkok**, **ASEAN** dan **Uni Eropa** mengalami peningkatan.



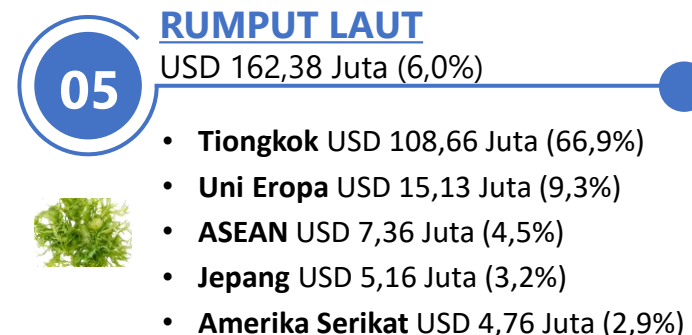
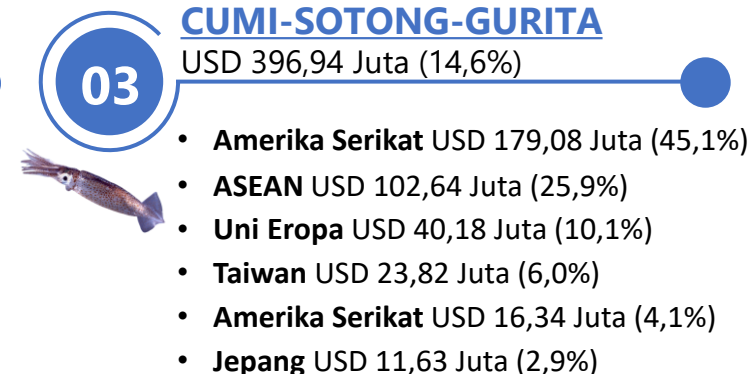
# Komoditas Utama Ekspor Produk Perikanan Indonesia Periode Januari – Juni 2024

#2024  
KKP BEYOND



- **Udang** masih menjadi komoditas utama ekspor produk perikanan Indonesia dengan nilai ekspor sebesar **USD 755,79 Juta**, selanjutnya diikuti **Tuna-Tongkol-Cakalang** sebesar **USD 456,64 Juta**, **Cumi-Sotong-Gurita** sebesar **USD 396,94 Juta**, **Rajungan-Kepiting** dengan nilai ekspor sebesar **USD 238,12 Juta**, dan **Rumput Laut** sebesar **USD 137,76 Juta**.
- Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023, **penurunan** ekspor terjadi pada komoditas **udang** dan **rumput laut**, sedangkan ekspor **TCT**, **CSG** dan **Rajungan-Kepiting** mengalami peningkatan.

Sumber: BPS Diolah Ditjen PDS-KKP (479 HS 2017 atau 507 HS 2022\*) s.d Juni 2024  
Kurs 1 Dollar : Rp. 16.300,-

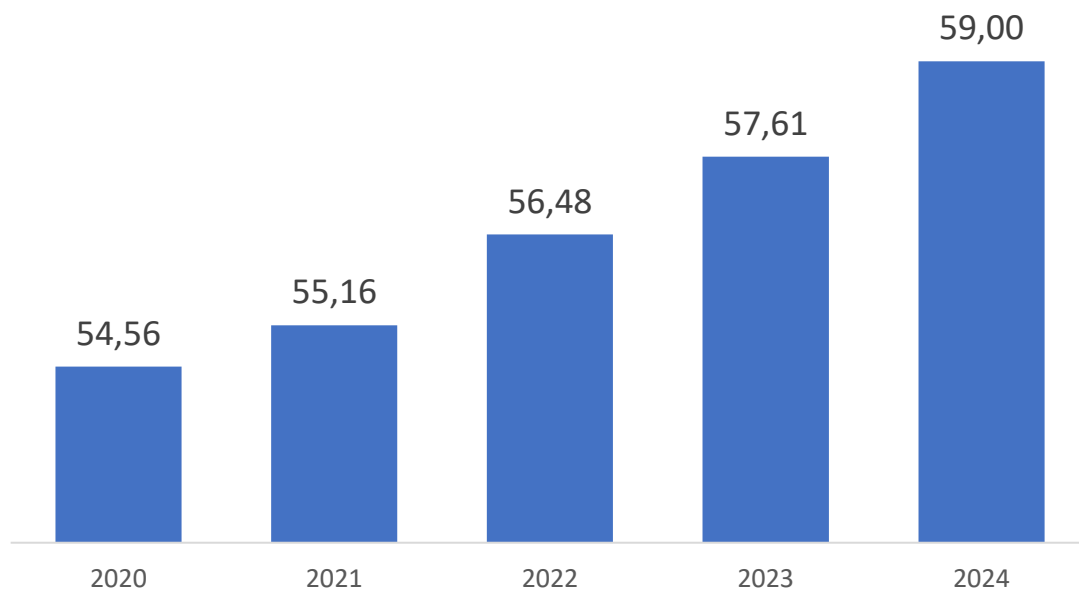


Sumber: BPS Diolah Ditjen PDS-KKP (479 HS 2017 atau 507 HS 2022\*) s.d Juni 2024  
Kurs 1 Dollar : Rp. 16.300,-





## 3c. Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)



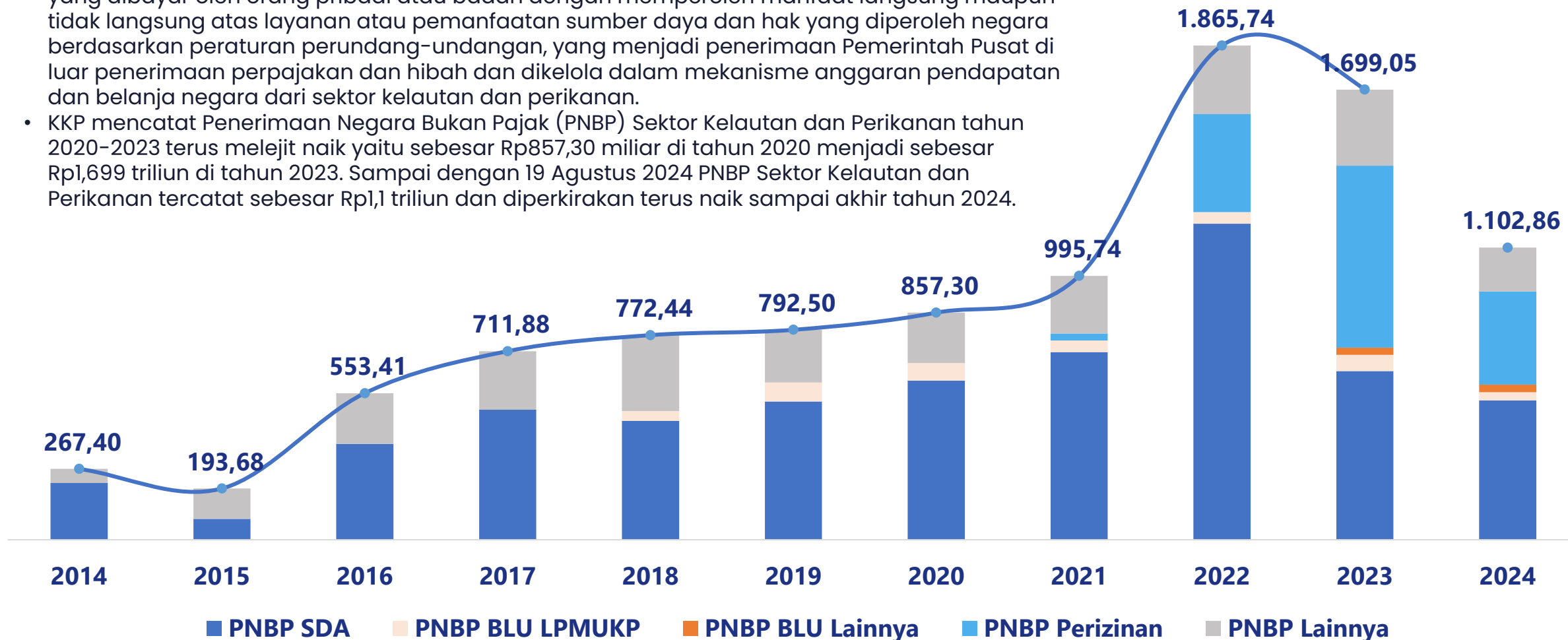
Sumber data: susenas, diolah oleh ditjen PDSPKP  
2016-2022: Capaian final  
2023: angka prognosa  
2024 : angka target



- Konsumsi ikan merupakan konsumsi ikan per kapita secara nasional (setara utuh segar) dari seluruh provinsi dibagi jumlah provinsi pada periode 1 tahun.
- Konsumsi ikan sepanjang tahun 2020-2023 terus meningkat yaitu sebesar 54,56 kg/kapita/tahun di tahun 2020 menjadi sebesar 57,61 kg/kapita/tahun di tahun 2023. Pencapaian kinerja angka konsumsi ikan didukung dengan pelaksanaan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan Promosi Produksi Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri.

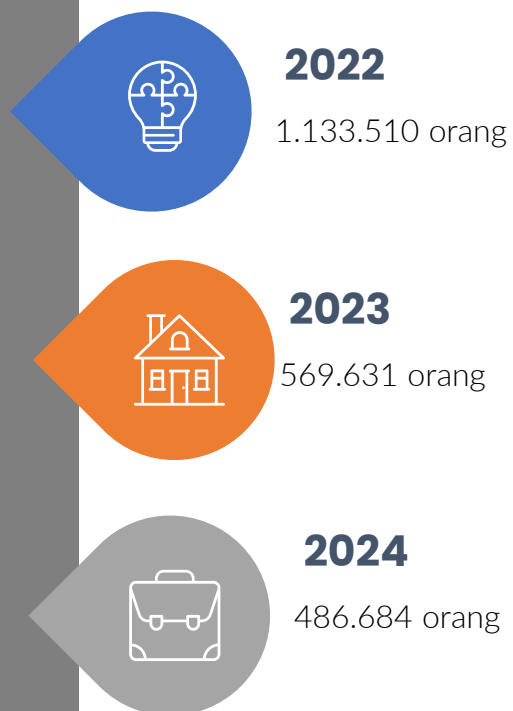
- Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.
- KKP mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2023 terus melejit naik yaitu sebesar Rp857,30 miliar di tahun 2020 menjadi sebesar Rp1,699 triliun di tahun 2023. Sampai dengan 19 Agustus 2024 PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan tercatat sebesar Rp1,1 triliun dan diperkirakan terus naik sampai akhir tahun 2024.

Satuan : Rp. miliar





## 3e. Tenaga Kerja yang Terlibat di Sektor Kelautan dan Perikanan



Sumber: KKP (diolah)  
2024 : angka target

- KKP sejak tahun 2022 telah menetapkan tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu indikator kinerja.
- Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta sertifikasi pengendalian mutu dan karantina ikan.
- Pada tahun 2024, target tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan sebesar 486.684 orang.

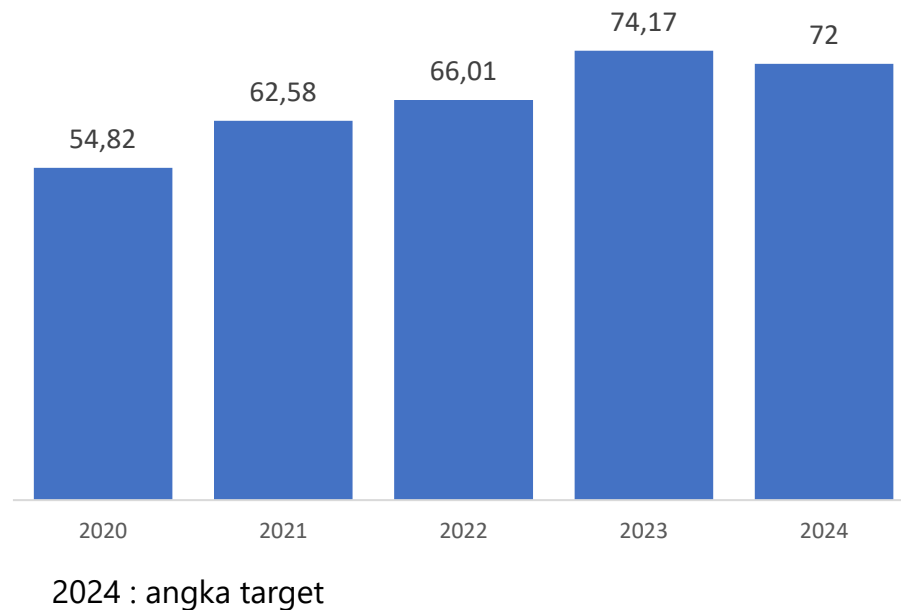


# Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 4. Kapasitas dan kompetensi SDM  
Kelautan dan Perikanan Meningkat



## 4a. Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)



- Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) terdiri dari jumlah lulusan pendidikan yang menunjukkan jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan dan jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan dan/atau bekerja di DUDI.
- Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan pada DUDI terus meningkat yaitu tahun 2020 sebesar 54,82 persen menjadi 74,17 persen di tahun 2023 dan ditargetkan menjadi sebesar 72 di tahun 2024.



# Capaian Indikator Kinerja

## Sasaran Strategis 5. Tata Kelola SDKP Bertanggung Jawab





# 5a. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (NRI) yang Melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur

- WPP yang melaksanakan penangkapan ikan terukur adalah WPP yang dalam pengelolaannya mampu mengadopsi prinsip-prinsip penangkapan ikan terukur seperti mempertimbangkan ketersediaan sumber daya ikan, alokasi usaha penangkapan ikan, dan penangkapan ikan sesuai dengan batas kuota yang ditetapkan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.
- WPPNRI yang melaksanakan prinsip penangkapan ikan terukur dengan persyaratan antara lain pengaturan pelabuhan pangkalan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan serta peningkatan kualitas dan kuantitas pendataan hasil tangkapan dengan penguatan teknologi informasi.
- Pada Tahun 2024, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dobo, menjadi salah satu lokasi pengembangan modeling Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di Kepulauan Aru, Maluku

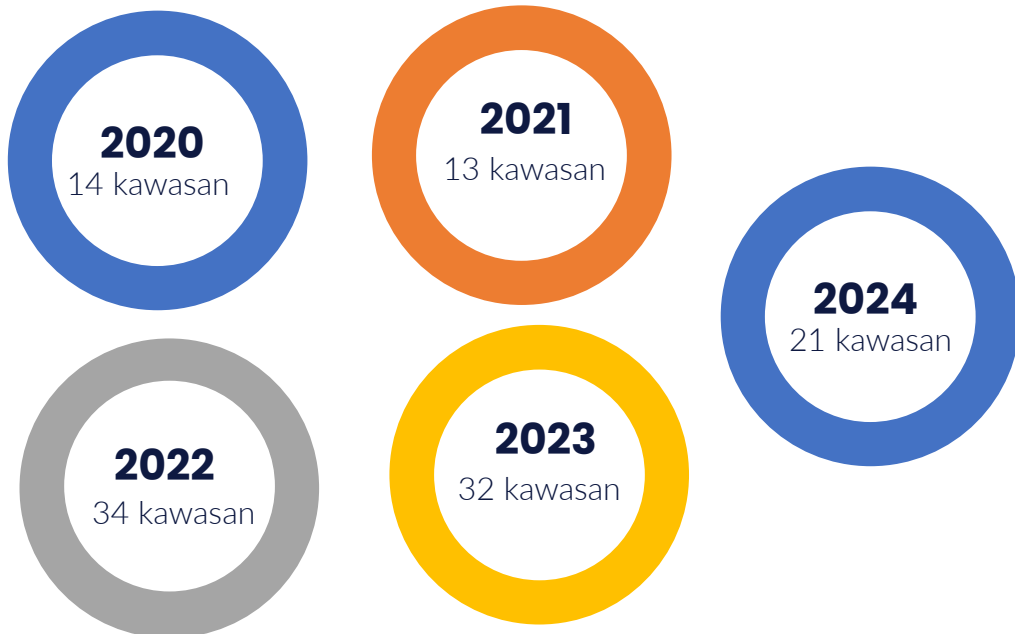


2024 : angka target





## 5b. Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir



2024 : angka target

- Penerapan penyelenggaraan penataan ruang laut dapat memberikan dampak positif yaitu kepastian Hukum Pemanfaatan Ruang Laut, mengurangi konflik penggunaan ruang laut, mengakomodir perluasan kawasan konservasi laut dalam program penataan ruang laut dan mengakomodir kegiatan perikanan tangkap dan budidaya laut dalam penataan ruang laut berbasis ekonomi biru dan kesehatan laut.
- Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir mencakup RZ Kawasan Antar Wilayah, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu PPKT dan Kawasan RZ KSNT NON PPKT, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Tata Ruang Laut.
- Tahun 2024 penyelesaian penataan ruang laut ditargetkan sebesar 21 Kawasan.

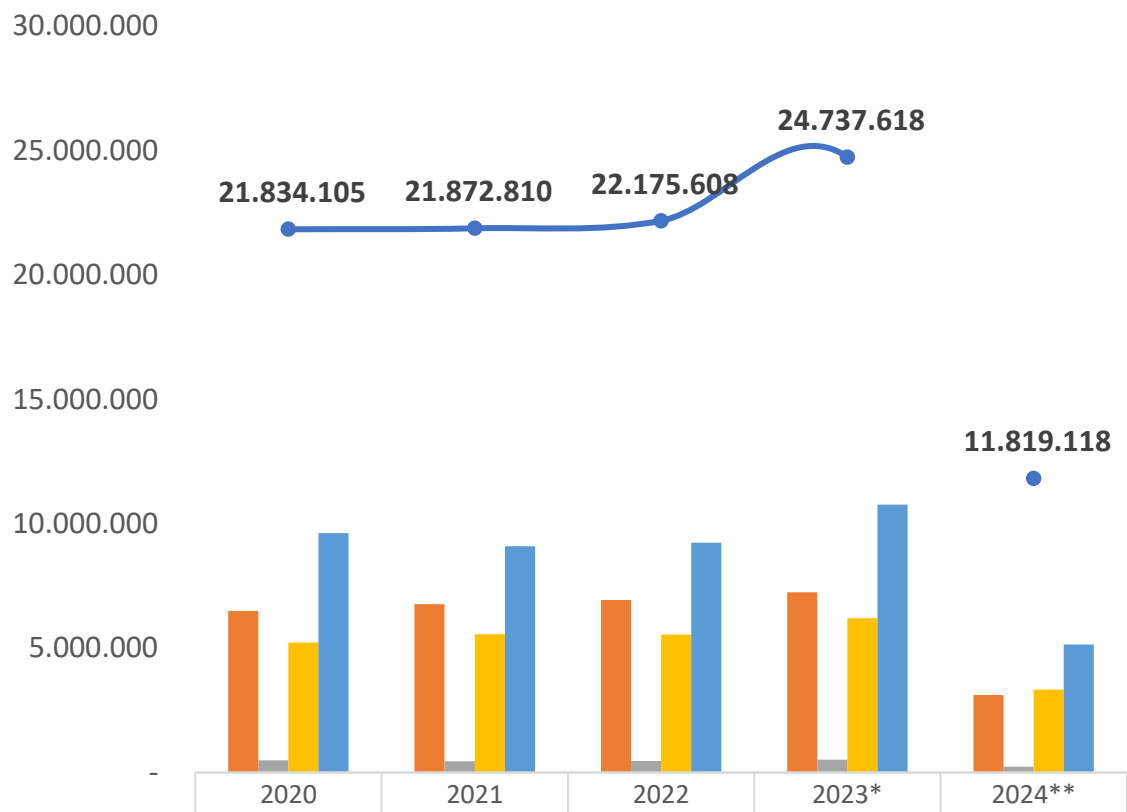


# Capaian Indikator Kinerja

## Sasaran Strategis 6. Industrialisasi kelautan dan Perikanan



# 6a. Produksi Perikanan (Ton)



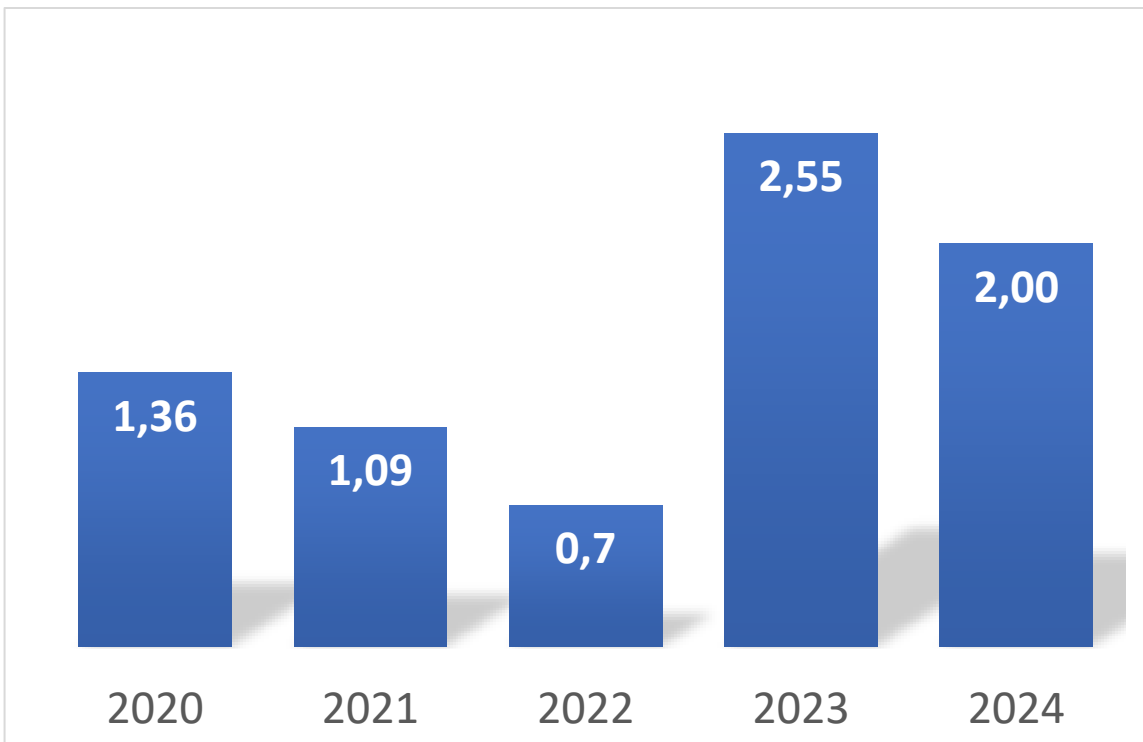
- Produksi perikanan merupakan Jumlah produksi perikanan budi daya yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota yang meliputi produksi perikanan budi daya air tawar, air payau dan laut dan jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam berat basah.
- Produksi perikanan di tahun 2020 mencapai 21,83 juta ton dan terus meningkat menjadi 24,73 juta ton di tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,37 persen.
- Produksi perikanan s.d triwulan II Tahun 2024 sebesar 11,82 juta ton terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 3,3 juta ton dengan komoditas terbesar tongkol, cakalang, dan tuna. Sedangkan produksi ikan budi daya sebesar 3,4 juta ton dengan komoditas terbesar nila, udang dan lele. Untuk produksi rumput laut sebesar 5,14 juta ton

	2020	2021	2022	2023*	2024**
Perikanan Tangkap - Laut	6.494.140	6.767.565	6.936.581	7.248.410	3.110.327
Perikanan Tangkap - Perairan Umum	494.950	456.936	462.970	521.690	228.729
Budi Daya - Ikan	5.226.594	5.556.278	5.541.789	6.200.740	3.335.210
Budi Daya - Rumput Laut	9.618.421	9.092.031	9.234.268	10.766.778	5.144.852
Total Produksi Perikanan	21.834.105	21.872.810	22.175.608	24.737.618	11.819.118

Sumber: satudatakkp  
 \*Tahun 2023 : angka sangat sementara  
 \*\* Tahun 2024 : angka Estimasi hingga Triwulan II-2024



## 6b. Produksi Garam Rakyat

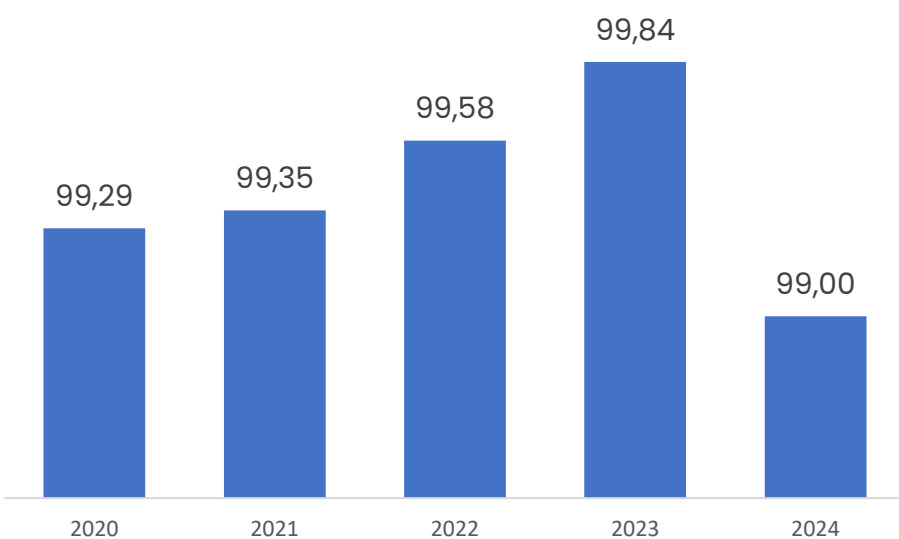


2024 : angka target

- Produksi Garam Nasional merupakan garam yang dihasilkan oleh petambak garam rakyat dan PT. Garam dalam satu musim produksi.
- Metodologi Pendataan Garam disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Badan Pusat Statistik.
- Produksi garam tahun 2020-2023 tumbuh positif dengan kenaikan rata-rata 69,55 persen. Tantangan utama yang dihadapi sektor pergaraman nasional diantaranya disparitas harga, kualitas produk yang rendah serta kurangnya keterampilan di kalangan petambak garam. KKP berkomitmen meningkatkan produksi garam rakyat melalui kerja sama dengan sektor swasta dan industri untuk memaksimalkan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam rakyat seperti pembangunan *washing plant*, tunnel garam, Gudang Garam Rakyat (GGR) dan integrasi lahan garam.



## 6c. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor

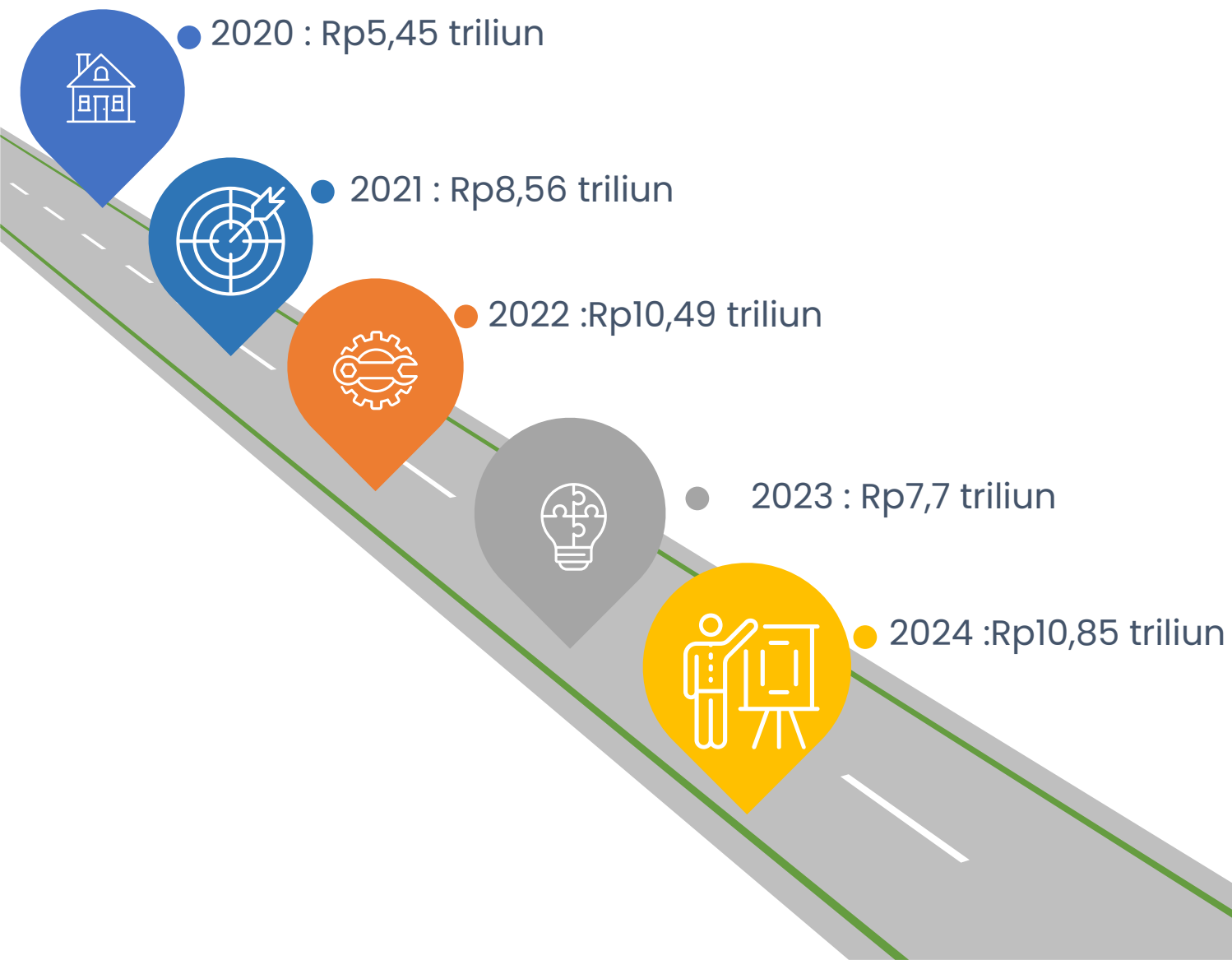


2024 : angka target

- Peningkatan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional salah satunya melalui penjaminan dalam bentuk Sertifikat kesehatan ikan (HC) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-D1*) yang diterbitkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor.
- Keberhasilan pencapaian rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor didukung melalui surveilan untuk pengendalian titik kritis penerapan *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP), penerapan *in-process inspection* di Unit Pengolahan Ikan, dan pengujian kesesuaian terhadap standar produk akhir (*end product testing*), infrastruktur mutu laboratorium terutama dalam akreditasi dan penambahan ruang lingkup pengujian kimia, mikrobiologi dan *organoleptic* serta peningkatan Kerjasama untuk memperkuat jejaring antar laboratorium Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam rangka meningkatkan kapasitas, kompetensi dan kinerja laboratorium.
- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 99,29 persen di tahun 2020 menjadi sebesar 99,84 di tahun 2023.



## 6d. Dana yang Disalurkan untuk Pelaku Usaha KP (RpTriliun Rupiah)



- Dana yang disalurkan untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terdiri dari pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program yang disalurkan oleh lembaga perbankan dan Lembaga keuangan non bank kepada UMKM kelautan dan perikanan dan penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP.
- Upaya yang dilakukan KKP untuk meningkatkan penyaluran dana kepada pelaku usaha antara lain melalui pembinaan dan pendampingan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, koordinasi dan sinergi kegiatan dengan Bank Penyalur KUR dan PT.PNM, serta edukasi dan sosialisasi literasi keuangan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- Realisasi penyaluran dana (akses permodalan) yang disalurkan kepada pelaku usaha terus meningkat yaitu sebesar Rp5,45 triliun di tahun 2020 menjadi Rp10,85 triliun di tahun 2024.

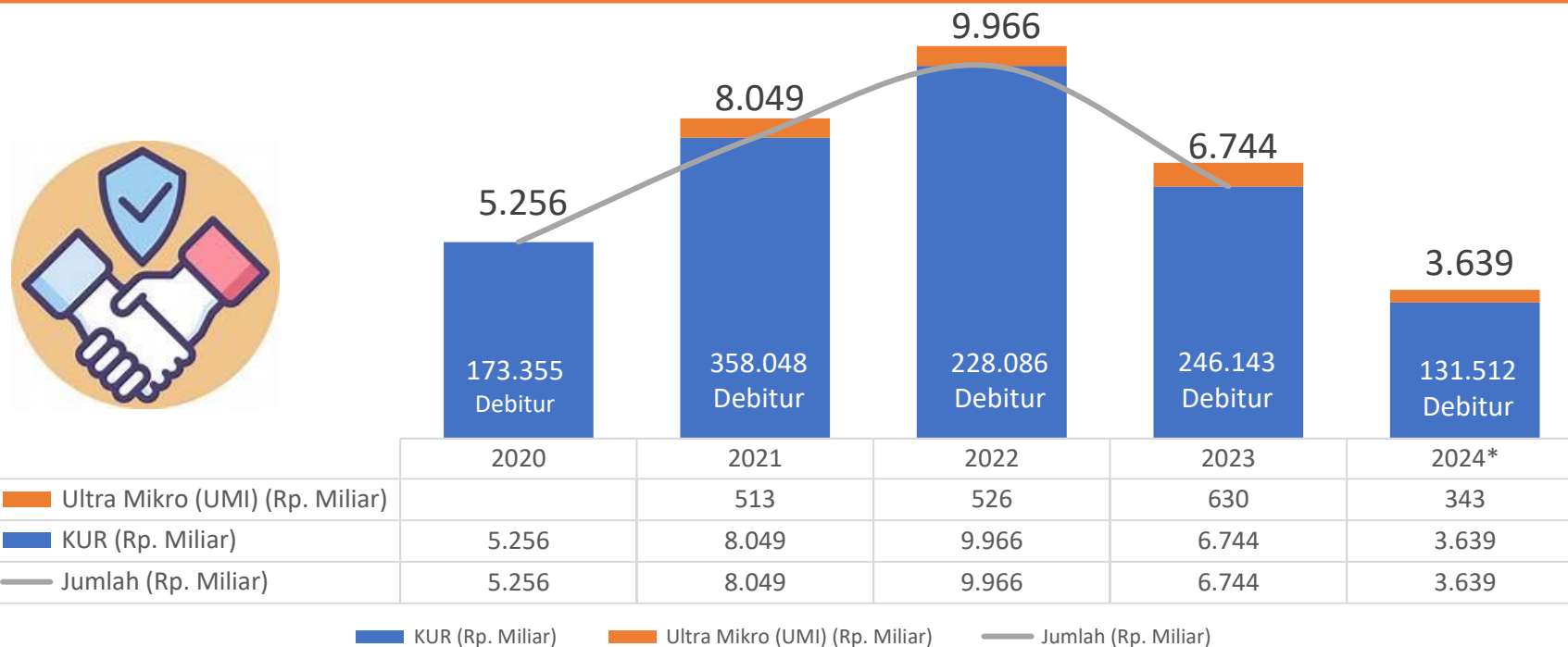


# Akses Permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro Untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan



- Tahun 2020-2023 penyaluran modal usaha melalui KUR dan UMI sebesar Rp33,65 triliun dengan pertumbuhan 14,87 persen.
- Sampai dengan triwulan II Tahun 2024 KUR Sektor Kelautan dan Perikanan telah mencapai Rp3,64 triliun dan Kredit Ultra Mikro sebesar Rp 343 miliar.
- KKP bekerja sama dengan Perbankan untuk meningkatkan penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan sekaligus terus memperbaiki skema penyaluran berkordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, demi memperluas akses permodalan bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

Sepanjang tahun 2020-s.d triwulan II Tahun 2024 KKP telah memfasilitasi pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mendapatkan permodalan KUR dan Ultra Mikro sebesar 33,65 triliun kepada 1.137.144 debitur



Sumber. Sistem Informasi Kredit Program Kementerian Keuangan Tahun 2024 (diolah KKP)

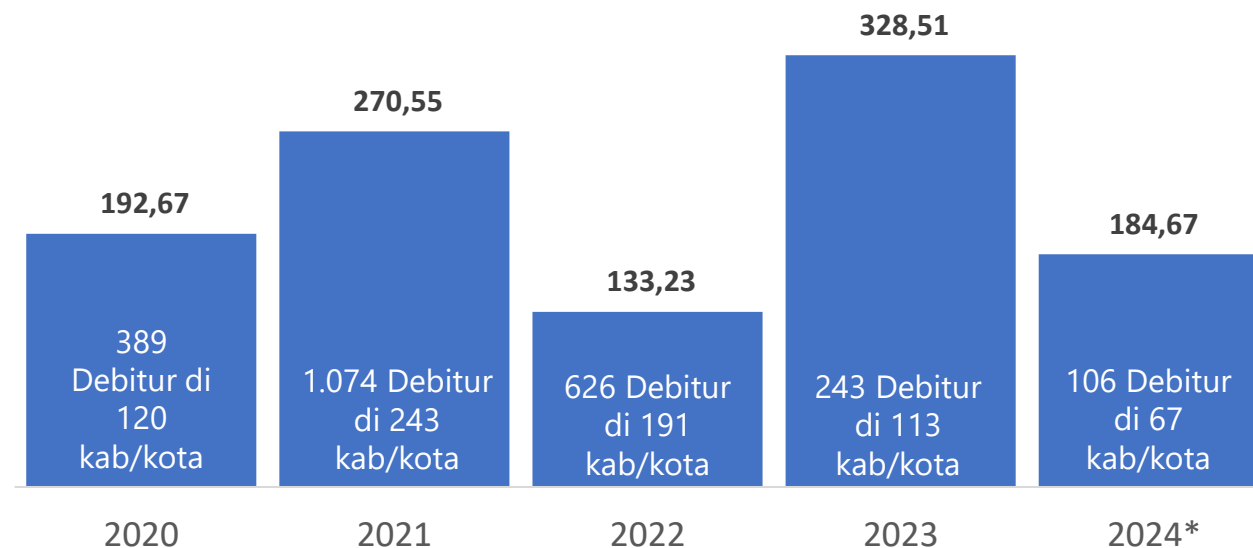




# Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP (Rp Miliar)



Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, KKP menyalurkan permodalan dana bergulir berbentuk Badan Layanan Umum - Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan Perikanan (BLU-LPMUKP) sebagai solusi mudah permodalan berbagai usaha kelautan dan perikanan.



Sumber: BLU LPMUKP, data s.d 31 Juli 2024

Selama tahun 2020-2024 telah disalurkan Rp1.109,64 miliar di 34 Provinsi

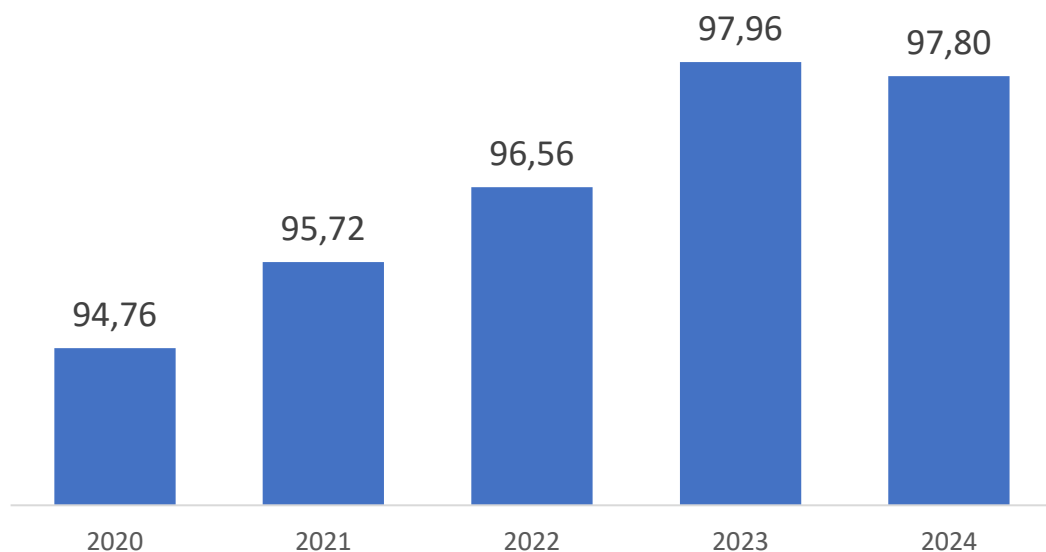


# Capaian Indikator Kinerja

## Sasaran Strategis 7. Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan Efektif



## 7a. Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan



2024 : realisasi s.d triwulan II Tahun 2024 (target tahun 2024 sebesar 98 persen)

- Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%) merupakan tingkat kesesuaian/kepatuhan kegiatan sektor kelautan dan perikanan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan sebagai hasil dari efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Capaian persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%) terus mengalami peningkatan, hal ini seiring meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan konsistensi pengawasan SDKP yang secara rutin dilakukan dalam mengawal sumber daya kelautan dan perikanan.



# OPERASI PENGAWASAN PENYELUNDUPAN BBL TAHUN 2024

## 4 Lokasi Rawan

- Pengepul BBL
- Pelabuhan Penyeberangan
- Pintu keluar Bandara
- Jalur Laut

## MODUS PENYELUNDUPAN BBL



PENGEPUL BBL



UDARA : MODUS MENGGUNAKAN KOPER



MENGGUNAKAN MOBIL BERGANTI-GANTI



MENGGUNAKAN KAPAL KECEPATAN TINGGI/KAPAL HANTU (200 PK)



Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum telah menggagalkan penyelundupan sebanyak **23** kali di **11** lokasi



Nilai BBL yang diselamatkan sebesar: **Rp. 277 Miliar**



Jumlah BBL sebanyak: **2 juta BBL**

## PENGUNGKAPAN KASUS

### Palembang-Sumsel



### Jambi



### Tangerang-Banten



## POLA OPERASI

**Secara Terbuka.** Dilakukan di sentral-sentral nelayan pada saat kegiatan penangkapan dan pengepulan BBL (Loc: Pangandaran, Sukabumi, Lebak, Trenggalek, Pacitan, Kebumen, dan Cilacap).

**Secara Tertutup.** Pengintaian di gudang-gudang pengepul yang diduga sebagai tempat *re-packing*, sebelum dilakukan penyelundupan (Loc: Kebumen, Pangandaran, dan Cilacap).



# KINERJA OPERASI KAPAL PENGAWAS DAN AIR SURVEILLANCE

## Operasi di Laut Mandiri



### Operasi Kapal Pengawas

**2.680** Kapal diperiksa kepatuhannya

**117** Obyek kelautan diperiksa kepatuhannya

### Dugaan Pelanggaran

**116** Kapal Perikanan (16 KIA dan 100 KII)

**7** Rumpon Ilegal

**1** Obyek Kelautan

Negara asal kapal ikan ilegal :

**Indonesia : 100**

**Malaysia : 3**

**Filipina : 9**

**Vietnam : 3**

**Rusia : 1**



### Operasi Udara

**11** Wilayah Pengelolaan Perikanan

Kapal Perikanan (16 KIA dan 100 KII)  
Kerugian yang dapat diselamatkan



**Rp.3,1 Triliun**

## Kerja Sama Operasi di Laut

### Patroli Bersama



- Tahap I : 20 Maret - 18 Mei 2024 (60 Hari)
- Tahap II : 3 Juni - 12 Juli 2024 (40 Hari)
- Tahap III : 6 Agustus – 4 September 2024 (30 Hari)
- Kapal pengawas terlibat : 8 unit
- Hasil : 292 kapal diperiksa kepatuhannya

### Patroli Terkoordinasi (Antar Negara)



- Nama operasi : Gannet-8
- Pelaksanaan: 9 sd 17 Mei 2024
- Armada terlibat: KP. Orca 05, KP. Hiu Macan 03 dan 1 pesawat ATR Air Surveillance
- Hasil : Pemeriksaan 14 Kapal Ikan Indonesia dan Pemulangan 36 Nelayan WNI



- Nama operasi : Patkor Optima Malindo 31 A 2024
- Pelaksaaan: tanggal 5-14 Juni 2024
- Armada terlibat: KP. Hiu 16
- Hasil pemeriksaan: 25 Kapal





# PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN

## Pelanggaran bidang Kelautan & Pengelolaan Ruang laut

1

Tidak memenuhi ketentuan perizinan dasar pemanfaatan ruang laut



3

Penangkapan ikan menggunakan bahan & alat yang merusak ekosistem (*destructive fishing*)



2

Tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha (pemanfaatan ikan dilindungi, Pulau-pulau kecil)

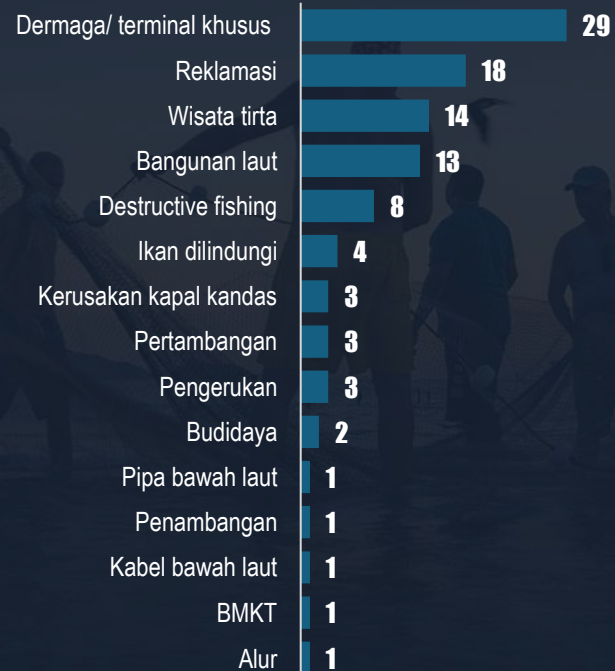


4

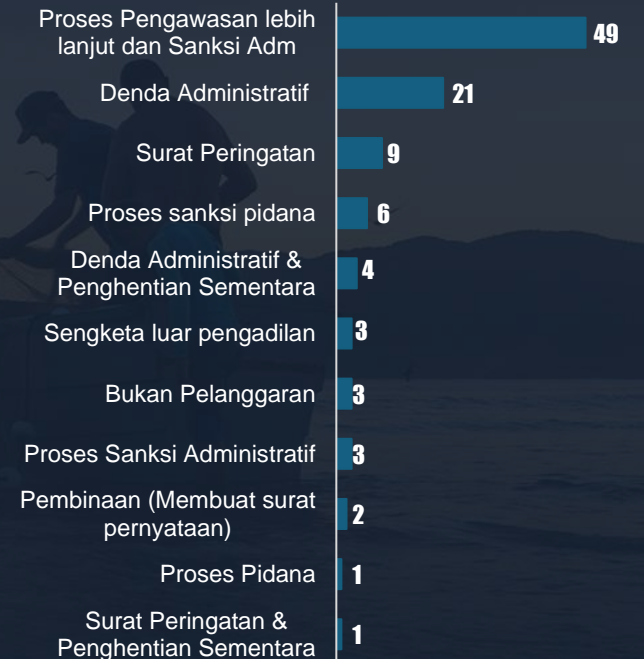
Menimbulkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya



## 102 Kasus yang ditangani 2024



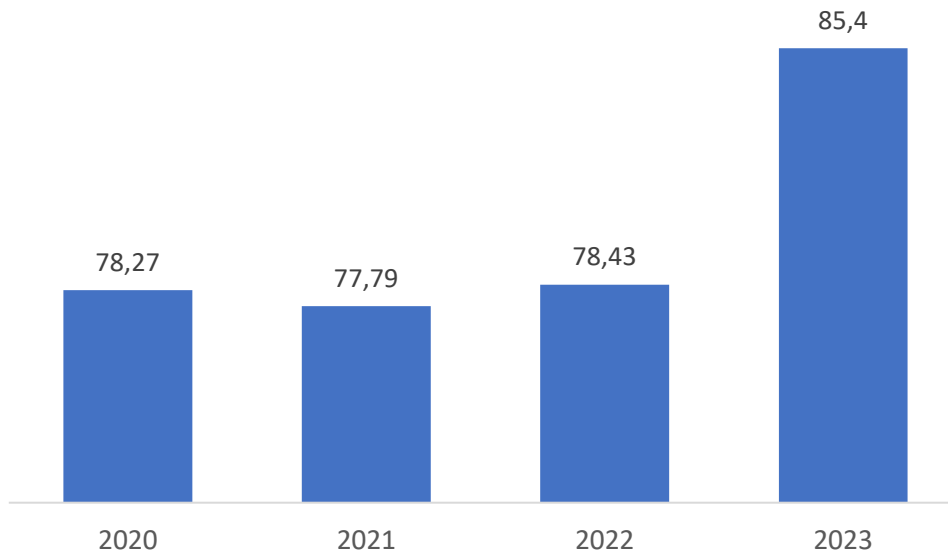
## Tindak Lanjut 102 Kasus yang ditangani 2024





# Capaian Indikator Kinerja

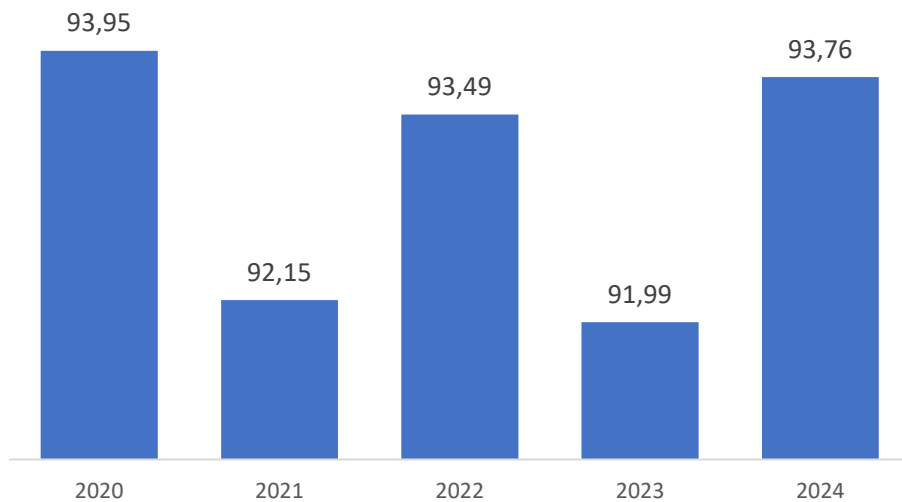
## Sasaran Strategis 8. Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas



Sumber. Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB

- Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan khususnya berkaitan dengan tiga hal utama yaitu: (1) mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, (2) birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), (3) serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).
- Capaian Indeks Reformasi KKP terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 78,27 di tahun 2020 menjadi sebesar 85,4 di tahun 2023 hal ini seiring dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang telah diperbaiki di lingkungan KKP.





2024 : angka target

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain




- Sangat Baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ;
- Baik, apabila  $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$ ;
- Cukup, apabila  $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$ ; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA  $> 70$

- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.



# Bukti Dukung yang Menjadi Klaim KKP ke Kementerian PAN dan RB



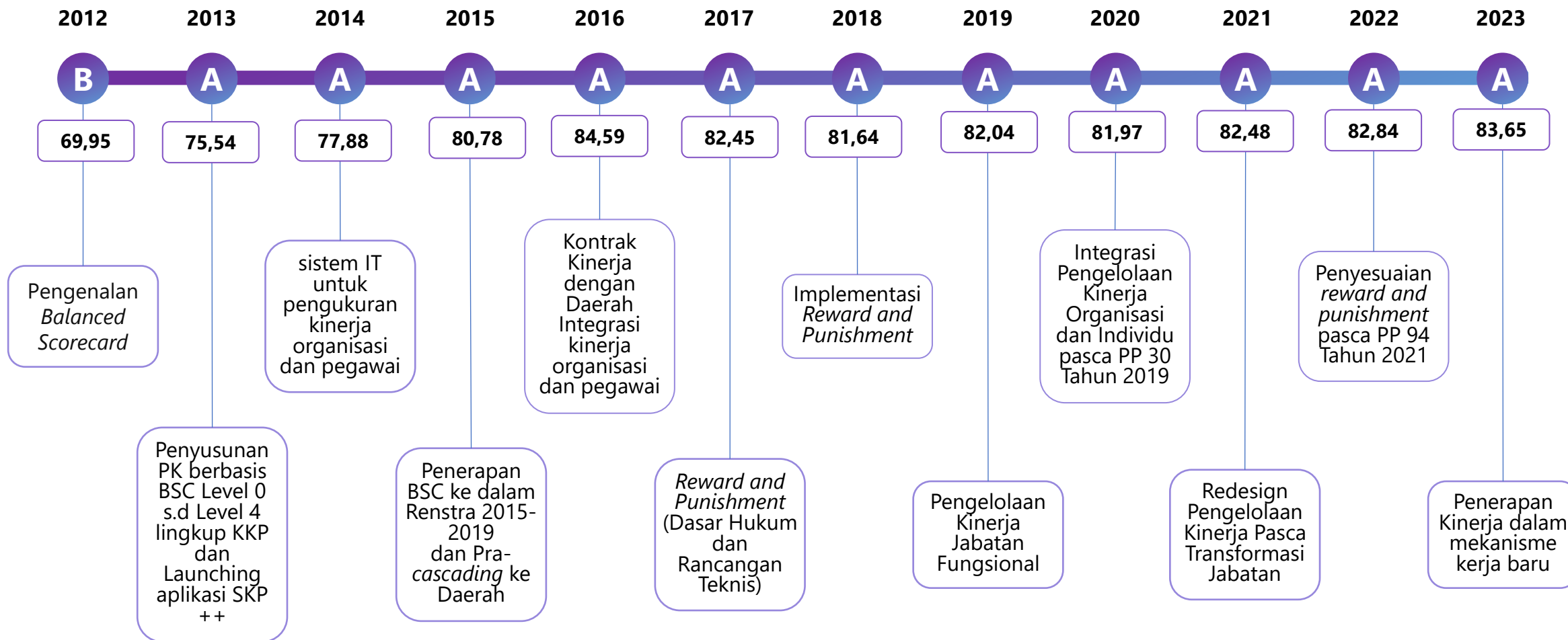
	 Eselon III	 Eselon IV	 Eselon V	
2020	291	839	177	1307
2021 - 2023	70	154	132	<b>269</b>

Penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekadar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional. Penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sepanjang tahun 2020-2024 KKP terus berupaya melakukan penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja sebagaimana Peraturan Menteri PANRB No. 7/2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi antara lain melalui penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja dengan memangkas Eselon III, IV dan V baik di Tingkat pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT), melantik pejabat administrasi (Eselon III/IV/V) yang terdampak penyederhanaan birokrasi kedalam Jabatan Fungsional baik di lingkungan pusat maupun Unit Pelaksanaan Teknis, dan menetapkan peta proses bisnis KKP berdasarkan Perpres dan Organisasi Tata Kerja KKP pasca penyederhanaan birokrasi.



# Nilai SAKIP KKP

#2024  
KKP BEYOND



Penguatan akuntabilitas kinerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui upaya penyempurnaan kinerja yang dimulai dari tahun 2012. Ini berdampak pada hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, sejak tahun 2013 KKP memperoleh predikat A dan terus ditingkatkan hingga saat ini.



# Opini BPK Atas Laporan Keuangan KKP

KKP Hat-Trick Raih Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2021, 2022 dan 2023

**2023**

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

**2022**

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

**2021**

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

**2020**

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*).



Perbaiki Tata Kelola Keuangan, BPK Berikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas LK KKP Tahun 2021  
(2 Agustus 2022)



KKP kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian Atas LK KKP Tahun 2022  
(27 Juli 2023)



KKP kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2023  
(19 Juli 2024)

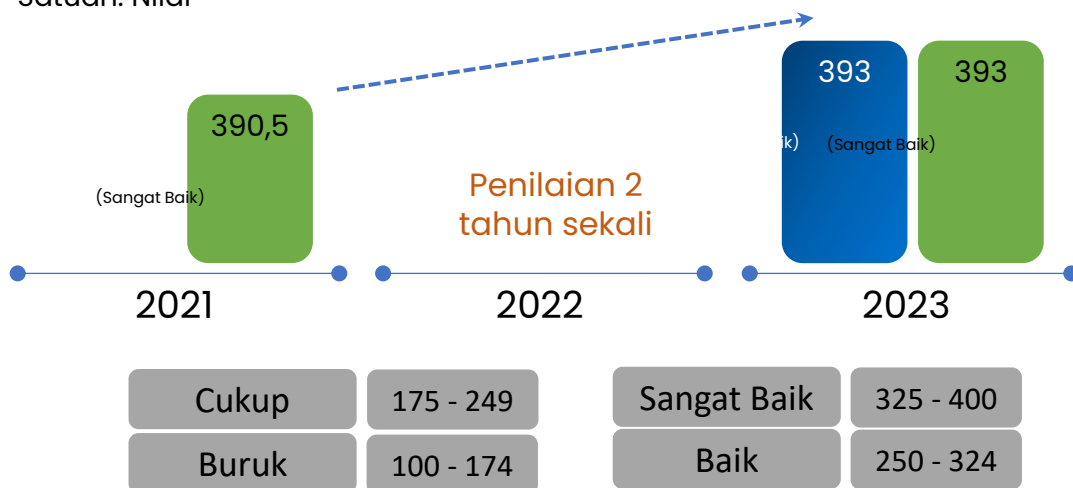
Opini WTP dapat KKP pertahankan sejak tahun 2021 s.d tahun 2023. KKP berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan oleh BPK tidak hanya membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memberikan umpan balik kepada semua unit kerja untuk memperbaiki proses pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Termasuk dalam pelaksanaan program-program ekonomi biru yang menjadi andalan KKP mentransformasi tata kelola kelautan dan perikanan nasional.





Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Indeks Sistem Merit dilakukan penilaian selama 2 tahun sekali

Satuan: Nilai

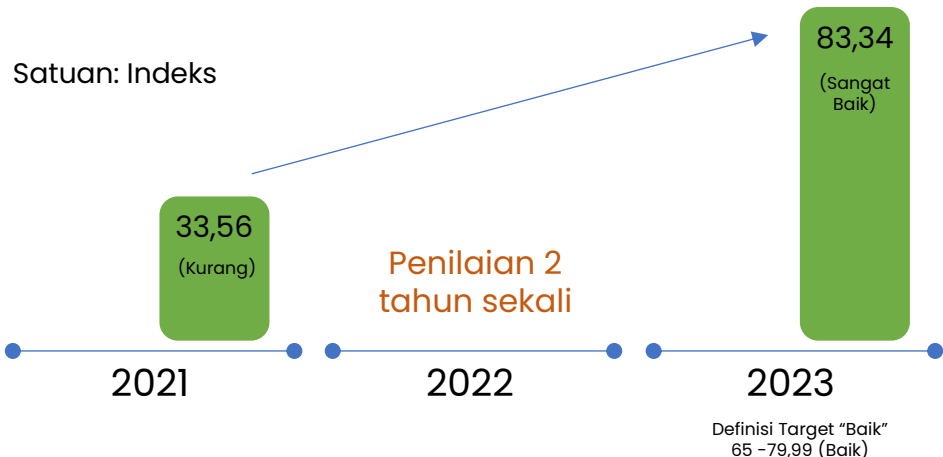


Penghargaan atas keberhasilan KKP dalam mengawal sistem merit dengan hasil penilaian yang sangat baik, dimana KKP bisa mengangkat Pejabat Pimpinan Tinggi tanpa seleksi terbuka melalui mekanisme manajemen talenta

1. Perencanaan kebutuhan ASN telah disusun berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan jumlah pegawai yang akan pension
2. Kebijakan internal dalam pemenuhan kebutuhan pegawai dan melaksanakan pengadaan secara terbuka dan kompetitif
3. Kebijakan dan program pengembangan karier yang berbasis manajemen talenta
4. Sistem informasi yang mendukung terwujudnya manajemen ASN berbasis merit



# Indeks Kualitas Kebijakan KKP



## Rencana Aksi

1. Optimalisasi tata kelola dan kapasitas manajemen kebijakan melalui kelengkapan data dukung dalam proses perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan
2. Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan
3. Memperkuat koordinasi teknis antar eselon I dan Lembaga Administrasi Negara

Open: Penilaian

### Indeks Kualitas Kebijakan

**Is Running**

**Nilai** 83.34

**Catatan**  
Penilaian seluruh sampel kebijakan instansi sudah cukup maksimal, karena progress pengisian sampel oleh instansi pada tujuh kebijakan telah mencapai 100%. Namun, beberapa bukti dukung tidak memiliki relevansi terhadap pilihan jawaban yang dipilih

**Rekomendasi**  
Berdasarkan kondisi hasil input self assessment, enumerator telah melakukan pengisian sampel kebijakan dengan baik. Saran teknis yang perlu dilakukan ialah instansi perlu melengkapi dan menggunggah bukti dukung yang relevan dengan jawaban yang dipilih dari tiap-tiap pertanyaan yang diberikan.

**Index** 1.25

**Instansi - LKE TP**  
Kementerian Kelautan Dan Perikanan

**Kegiatan LKE**  
Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga 2023

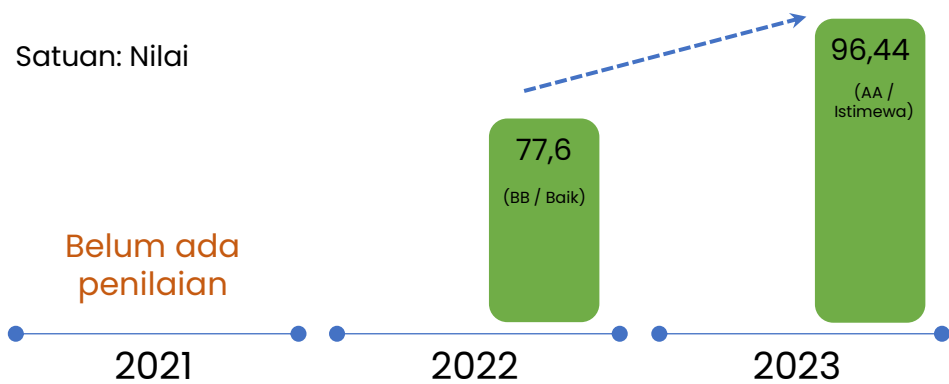
**Jenis RB** RB General



KKP memperoleh Penghargaan sebagai lokus pilot project Lab Kebijakan dari LAN RI







**JDIH Terbaik V Tingkat Kementerian**  
Pertemuan Nasional Dokumentasi dan Informasi Hukum Legal Development Content Creator (LDCC) 2023



JDIH KKP Meraih Penghargaan Juristica Award Tahun 2023

**JDIH dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terbaik**  
Penghargaan Juristica Award 2023

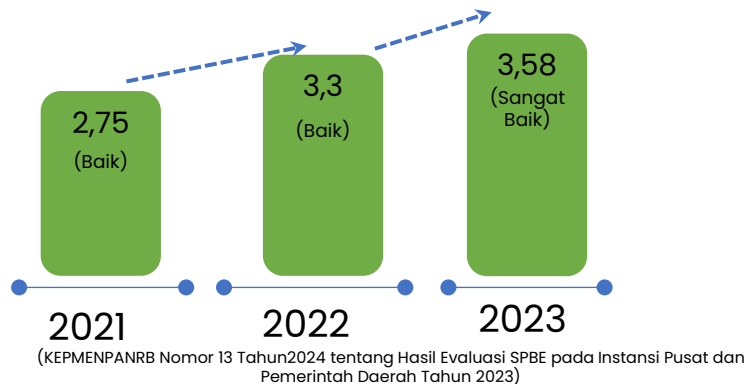


# Indeks SPBE

#2024  
KKP BEYOND

Satuan: Nilai

Definisi target  
"Baik": 2,6 - < 3,5  
(Baik)



## [statistik - kkp]

SATUDATA | DASHBOARD KUSUKA | SATUPETA

### NAVIGATION

- JTB/Potensi/SDI WPP
- Produksi Perikanan
- Nelayan/Pembudidaya
- Rumah Tangga Perikanan
- Jumlah Kapal
- Luas Lahan Budidaya
- Produksi Garam
- Petambak Garam
- Angka Konsumsi Ikan
- Ekspor - Impor
- IKU KKP

## Produksi Perikanan / Kelautan dan Perikanan

Data Tabel Dinamis Metodologi Konsep

### Data Statis Produksi

- Volume Produksi Perikanan Indonesia (Ton)
- Nilai Produksi Perikanan Indonesia (Rp 1.000.000)
- Volume Produksi Perikanan Tangkap per Provinsi (Ton)
- Volume Produksi Perikanan Tangkap Laut per Provinsi (Ton)
- Volume Produksi Perikanan Tangkap PUD per Provinsi (Ton)
- Nilai Produksi Perikanan Tangkap per Provinsi (Rp 1.000.000)
- Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut per Provinsi (Rp 1.000.000)
- Nilai Produksi Perikanan Tangkap PUD per Provinsi (Rp 1.000.000)
- Volume Produksi Perikanan Budidaya Pembesaran per Provinsi (Ton)

Statistik KKP sebagai *dashboard* berbasis elektronik untuk seluruh data statistik KKP



KKP telah memiliki dashboard **Portal.kkp.go.id** yang telah mengintegrasikan proses manajerial KKP seperti persuratan, manajemen pengetahuan, *employee self service* (cuti dan perjalanan dinas)



*E learning* KKP sebagai *dashboard* peningkatan kapasitas SDM KKP berbasis elektronik (pelatihan, diklat)

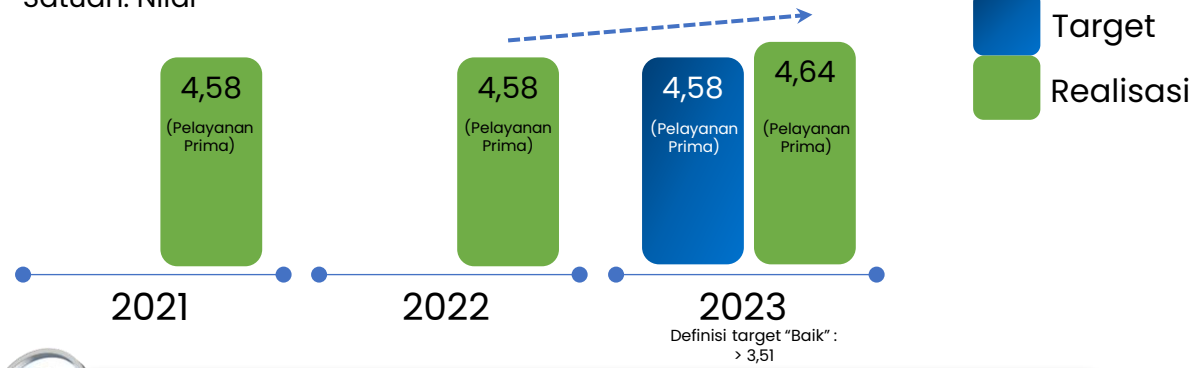


# Indeks Pelayanan Publik & Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

#2024  
KKP BEYOND

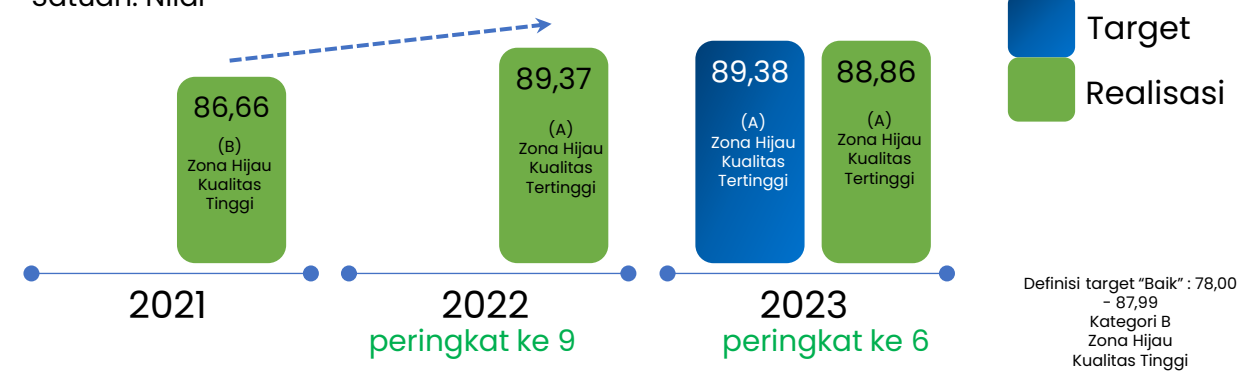
## Indeks Pelayanan Publik

Satuan: Nilai



## Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Satuan: Nilai



## Penghargaan KKP 2023 di bidang Pelayanan Publik:

### Top 99 Inovasi



**Inovasi Fuji Lestari** (*Fish Apartement* untuk jadikan laut sehat, nelayan hebat dan mandiri) oleh BBPI Semarang

### 50 UPP Terbaik

#### Penyedia Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan

- PTSP KKP
- BPKIL Serang
- BPPMHKP Makassar
- BPPMHKP Mataram
- BPPMHKP - BUSKIPM



KKP mendapatkan **Predikat Kepatuhan Tinggi Tahun 2023** oleh Ombudsman Republik Indonesia dan berhasil masuk **peringkat ke 6 dari 27** Kementerian dengan hasil penilaian sebesar **86,66** sekaligus masuk kategori **Zona Hijau**. Predikat Kepatuhan Tinggi diberikan kepada KKP atas penilaian kinerja 20 produk pelayanan (layanan administrasi pusat) dengan hasil 19 produk layanan dari 10 Direktorat lingkup KKP mendapatkan kategori Hijau.



Capaian 2022: **60,9%**  
Cukup Sehat

Capaian 2023: **62,5%**  
(Skala 0 – 100)

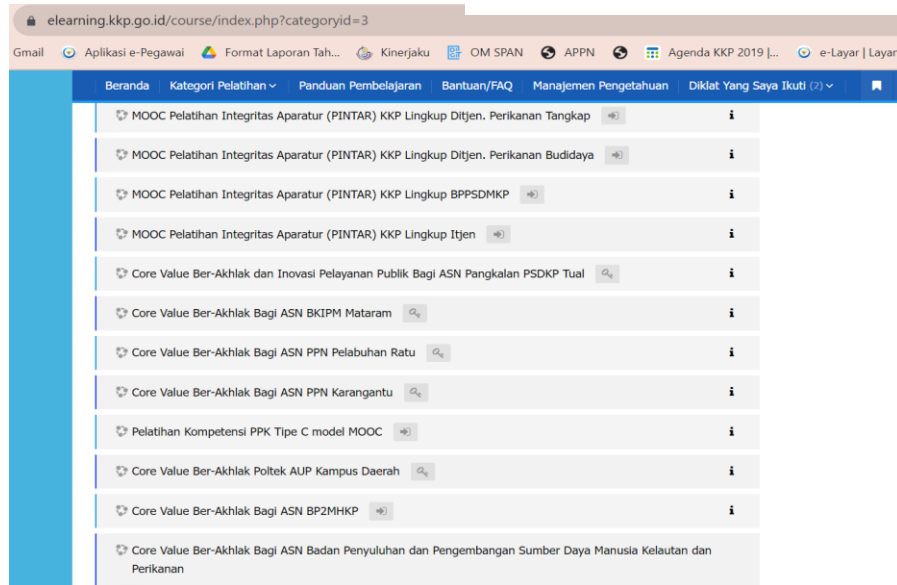


Sehat	75%-100%
Cukup Sehat	50%-74,9%
Tidak sehat	25%-49,9%
Sangat Tidak Sehat	0%-24,9%

## Upaya yang telah dilakukan :

- Penyiapan perangkat pembelajaran Core Value BerAkhlik
- Persiapan penyelenggaraan pelatihan
- Pelaksanaan pelatihan core value berakhlak terhadap ASN (secara daring/MOOC)
- Evaluasi pasca pelaksanaan pelatihan core value berakhlak
- Pelaksanaan penilaian mandiri Employee engagement

Sebanyak **1.216** pegawai KKP telah mendapatkan sertifikat Pelatihan Core Value Ber-AKHLAK



Pelatihan core value berakhlak terhadap ASN (secara daring/MOOC) pada [elearning.kkp.go.id](http://elearning.kkp.go.id) KKP guna peningkatan Indeks BerAKHLAK



# Data Dukung Lainnya Prestasi KKP 2020-2024





## TAHUN 2020

1. Bhumandala Award 2020
2. Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2020 (inovasi pelayanan publik serta inovasi di masa pandemi Covid-19)
3. Herudi Technical Commite Award (HTCA) Tahun 2020 untuk Komite Teknis Produk Perikanan Nonpangan
4. MURI "Makan Ikan Serentak di Lokasi Terbanyak di Seluruh Indonesia"
5. Anugerah ASN Inspiratif (salah satu ASN KKP yaitu Arif Wibowo yang berasal dari Balai Riset Perikanan, Perairan Umum, dan Penyuluhan Perikanan Palembang berhasil meraih Top 3 PNS Inspiratif
6. Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) salah satu program prioritas nasional KKP terpilih sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB Tahun 2020

## TAHUN 2021

1. Capaian Akuntabilitas Keuangan (Opini BPK atas LK KKP)
2. BKN Award 2021 (Peringkat 2 Kategori Penilaian Kompetensi)
3. Anugerah Metokrasi dengan Predikat Sangat Baik.
4. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2020 oleh Kementerian PAN dan RB.
5. Kompetensi Inovasi Pelayaann Publik (KIPP) Kategori Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021
6. Anugerah Keterbukaaan Informasi Publik Tahun 2021 dengan Predikat A
7. Penghargaan di Bidang Media Digital Tahun 2021 "Top Digital Implementattion"
8. Penghargaan Kategori Mentor pada Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya
9. Penghargaan dengan Kategori Sangat Memuaskan dari ANRI untuk Kerasipan
10. Penghargaan Gatra Award Tahun 2021 atas kinerja pemberantasan Illegal Fishing
11. Pengharagaan dari Kementerian Keuangan atas Kinerja KL TA 2020 dengan Kategori Kementerian /Lembaga dengan Kategori Pagu Sedang (Nilai Kinerja KKP berada pada urutan ke-9 dengan nilai 92,33.
12. Herudi Technical Commite Award (HTCA) Tahun 2021 untuk Komite Teknis Produk Perikanan Nonpangan
13. Penghargaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional KKP berhasil mendapatkan peringkat 11 untuk jenis kategori Kementerian dari total keseluruhan 33 Kementerian Negara dengan pencapaian nilai 80

## TAHUN 2022

1. Brevet Kehormatan dari Hidro-Oseanografi TNI AL
2. BKN Award 2022 dari Badan Kepegawaian Negara
3. Juara kedua kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian
4. BKN Award 2022 dari Badan Kepegawaian Negara
5. Juara ketiga kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja pada kementerian tipe besar
6. Top Government Public Relations 2022 dari GPR Institute
7. Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi (PSBE) tahun 2022 untuk kategori Penghematan Energi di Instansi Pemerintah.
8. Juara pertama kategori Penerbitan Media Internal (In-house Magazine) melalui Segara pada Anugerah Media Humas 2022 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
9. Bhumandala Award BIG dari Badan Informasi Geospasial
10. Bhumandala Kanaka (Medali Emas) untuk kategori kementerian/lembaga,
11. Bhumandala Kencana untuk kategori Geoportal terbaik.
12. Unit Terbaik Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2022 dari Kemenpan-RB
13. Predikat Akreditasi A dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
14. Predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat
15. Tokoh Transformasi Tata Kelola Perikanan pada ajang GATRA Awards 2022
16. Kategori Badan Publik Informatif
17. Penghargaan KPK untuk Strategi Pemberantasan Korupsi KKP di Pelabuhan



## TAHUN 2023

1. JDIH Terbaik Kelima Tingkat Kementerian;
2. JDIH terbaik Pertama di lingkup Menko Marves
3. Capaian Akuntabilitas Keuangan dengan predikat WTP dari BPK RI
4. Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
5. Penghargaan pelayanan publik UNPSA PBB dengan tema perubahan iklim
6. GERMAS Award 2023, Terbaik I, dari Kemenko PMK
7. Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Sarpas Ramah Kelompok Rentan dari Kemen PANRB
8. Anugerah Reksa Babdha
9. Juara Kedua Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan dari Kementerian Keuangan
10. Top Government Public Relations Award
11. Penghargaan kategori Excellent Award for Strategic Initiative pada ajang Indonesia Award 2023
12. Tokoh Penggagas Ekonomi Biru pada detikcom Awards 2023
13. Penghargaan "Government of the Year" pada ajang Indonesia Logistics Awards (ILA) 2023.
14. The Best Leader for Developing Blue Economy Strategy di HUT KKP Ke-24 dari iNews Media Group - MNC Group
15. Predikat Kualitas Tertinggi atau Zona Hijau dalam penganugerahan Penilaian Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman

## TAHUN 2024

1. Penghargaan Predikat Sangat Memuaskan Kategori Pengawasan Arsip dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)
2. penghargaan 5 Terbaik pada ajang Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI) Pelayanan Publik untuk Kelompok Keberlanjutan Inovasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Untuk Pogram Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) meraih



## 1. KKP Hat-Trick Raih Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2021, 2022 dan 2023



**PERBAIKI TATA KELOLA KEUANGAN, BPK BERIKAN OPINI  
WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAS LK KKP  
TAHUN 2021 (2 Agustus 2022)**



**KKP kembali meraih predikat WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAS  
LK KKP TAHUN 2022 (27 Juli 2023)**

”KKP terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara”





# 1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan KKP

#2024  
KKP BEYOND



KKP kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 (19 Juli 2024)

Opini WTP dapat KKP pertahankan sejak tahun 2021 s.d tahun 2023. KKP berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan oleh BPK tidak hanya membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memberikan umpan balik kepada semua unit kerja untuk memperbaiki proses pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Termasuk dalam pelaksanaan program-program ekonomi biru yang menjadi andalan KKP mentransformasi tata kelola kelautan dan perikanan nasional.



## 2. Kinerja Anggaran K/L Terbaik ke-2

#2024  
KKP BEYOND

BELANJA  
UNTUK TRANSFORMA



KKP meraih Penghargaan K/L (Pagu Sedang Kinerja Anggaran )  
Terbaik Ke 2 dengan kinerja anggaran terbaik  
(17 Mei 2023)

### Pelaksanaan Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022

“KKP akan terus berupaya reformasi birokrasi pada unit-unit kerja KKP untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas setiap kegiatan dan anggaran baik pada layanan perizinan, pendampingan usaha bagi Masyarakat kelautan dan perikanan, infrastruktur perikanan hingga peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan”





# 3. Pengelolaan Aset



KKP memperoleh penghargaan Anugerah Reksa Bandha sebagai Juara Kedua pada kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan dari Kementerian Keuangan (23 November 2022)

“Pengelolaan aset yang baik mencerminkan kemampuan suatu negara untuk merencanakan dengan baik, dan mencerminkan bagaimana K/L mengelola pembangunan dengan kualitas yang bagus karena hal ini mencerminkan kepedulian antargenerasi.”



# 4. BKN Award



KKP meraih **Peringkat 3** kategori **Pengembangan Kompetensi** (BKN Award 2022)



KKP meraih **Peringkat 2** kategori **Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja** (BKN Award 2022)



KKP meraih **Peringkat 3** kategori **Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja** (BKN Award 2022)

KKP meraih **Peringkat 2** kategori **Penilaian Kompetensi** (BKN Award 2021)

“Prestasi ini menjadi pemicu semangat untuk para pegawai terus bekerja melayani masyarakat kelautan dan perikanan. Pegawai adalah aset kita dalam melayani masyarakat, sehingga butuh *human capital treatment* agar kompetensi mereka terjaga dan bahkan terus meningkat”





**KKP meraih Penghargaan Manajemen Talenta  
telah mengisi Pimpinan Tinggi melalui Mekanisme Manajemen Talenta**





# 6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)



JDIH KKP Meraih Penghargaan Juristica Award Tahun 2023

**JDIH dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terbaik Penghargaan Juristica Award 2023 (13 November 2023)**

**JDIH Terbaik V Tingkat Kementerian Pertemuan Nasional Dokumentasi dan Informasi Hukum Legal Development Content Creator (LDCC) 2023 (12 Oktober 2023)**





# 7. Pelayanan Prima

#2024  
KKP BEYOND



## Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan  
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sebagai

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik  
Kategori "Sangat Baik"  
Tahun 2023

Jakarta, 21 November 2023  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
Reformasi Birokrasi



H. Abdullah Azwar Anas, M.Si



## Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak  
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sebagai

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik  
Kategori "Pelayanan Prima"  
Tahun 2023

Jakarta, 21 November 2023  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
Reformasi Birokrasi



H. Abdullah Azwar Anas, M.Si



## Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

Balai Uji Standar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan  
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sebagai

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik  
Kategori "Pelayanan Prima"  
Tahun 2023

Jakarta, 21 November 2023  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
Reformasi Birokrasi



H. Abdullah Azwar Anas, M.Si

KKP meraih peringkat 8 Pelayanan Prima pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh 3 Unit Lokus Evaluasi BPSPL Pontianak, PPN Kejawanan dan BUSKIPM





# 8. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Pelayanan Publik



5 Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik KKP memperoleh penghargaan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) terbaik penyedia sarana prasarana pelayanan publik ramah kelompok rentan

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang
- Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar
- Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram
- Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta





Pembudayaan Germas tertuang dalam **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**

Program Germas dilaksanakan melalui enam kegiatan pokok, yaitu peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup sehat.

### **KKP Raih Juara Pertama Germas Award 2023** **14 November 2023**

Melalui Germas, KKP terus berupaya untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif.



Berdasarkan Pengumuman nomor AK.01.00/23/2023 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023, bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih prestasi dalam bidang kearsipan **dengan predikat “AA (Sangat Memuaskan)”** pada hasil pengawasan kearsipan 2023 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk kategori lembaga setingkat kementerian.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima **Sertifikat Akreditasi Kearsipan** dengan peroleh **Terakreditasi A (sangat memuaskan)** oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tahun 2022. Hal ini membuktikan bahwa KKP tertib beradministrasi dan memiliki pedoman yang jelas dalam kearsipan lembaga.



**PENGUMUMAN**  
**NOMOR: AK.01.00/23/2023**  
**TENTANG**  
**HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2023**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan pengawasan kearsipan terhadap kementerian, lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Akreditasi Kearsipan, serta pemerintah provinsi melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap pemerintah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.

LAMPIRAN  
NOMOR : AK.01.00/23/2023  
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

**HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN**  
**TAHUN 2023**

**I. KEMENTERIAN**

NO	NAMA INSTANSI	KATEGORI
1	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
5	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
6	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
7	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
8	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
10	Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
11	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
12	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
13	Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
14	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
15	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)

*“digitalisasi membawa perubahan besar pada sistem pelayanan yang ada di KKP sehingga menjadi lebih cepat, efisien dan transparan. Terutama, dalam hal pengumpulan atau pengarsipan dan pengolahan data yang akan digunakan untuk membuat program kerja maupun kebijakan”*  
(Menteri Kelautan dan Perikanan, 19 Mei 2022)





# 11. Bhumandala Award 2023

#2024  
KKP BEYOND

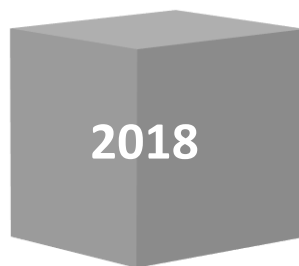
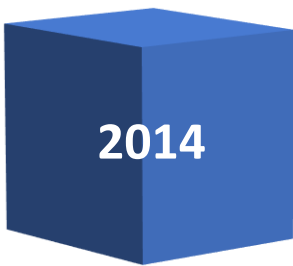


KKP berhasil meraih **Bhumandala Kanaka (Medali Emas)** untuk kategori Kementerian/Lembaga, dan **Bhumandala Kencana** untuk kategori Geoportal terbaik. Penghargaan **Bhumandala Kanaka dan Bhumandala Kencana** diberikan kepada KKP atas pencapaiannya dalam pengembangan simpul jaringan informasi geospasial.

(26 November 2022)



# 12. Pengarusutamaan Gender



PRATAMA

MADYA

UTAMA

MENTOR



**Predikat Mentor pada Anugerah Parahita Ekapraya (APE)** yaitu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas komitmennya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak





**SLIN KKP Raih Penghargaan Indonesia Logistics Awards 2023  
(15 Oktober 2023)**

Keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengimplementasikan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) diapresiasi Supply Chain Indonesia (SCI)

SLIN telah berperan dalam membangun dan mengembangkan sistem manajemen rantai pasokan ikan dan hasil perikanan terintegrasi





# 14. Anugerah Zona Integritas menuju WBK Tahun 2023

#2024  
KKP BEYOND



## UPT BPPMHKP Balikpapan

mendapatkan Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas menuju WBK Tahun 2023 dari Kementerian PANRB yang akan dilaksanakan pada RBXperience 6 Desember 2023 di Denpasar





# 15. Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023



Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 dilakukan terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten. **KKP berhasil meraih posisi enam atau naik tiga peringkat dari tahun sebelumnya, dengan nilai 88,86.**  
**(14 Desember 2023)**



# 16. Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif



KKP mendapat penghargaan sebagai badan publik Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 19 Desember 2023.





KKP mendapat penghargaan atas Penerapan Kebijakan Pengarusutamaan Gender melalui penempatan ASN Perempuan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi pada Tahun 2023 sebesar 36,84% oleh IPIMTI, Jakarta 22 Desember 2023.



## 18. Penghargaan *Best Leader*

#2024  
KKP BEYOND



Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meraih detikcom Awards 2023 kategori **Tokoh Penggagas Ekonomi Biru**

“Berbagai terobosan yang telah dikembangkan di sektor kelautan dan perikanan menjadi bukti nyata kepemimpinan visioner Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam mendorong Indonesia menjadi pemimpin dalam industri ekonomi biru”





# 19. Penghargaan Indonesia *Visionary Leader*

#2024  
KKP BEYOND



Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendapat **penghargaan Indonesia Visionary Leader** dari MNC Group



Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin mendapat **Penghargaan Indonesia Visionary Leader dalam hal *Integrated Surveillance System* berbasis Teknologi** dari MNC Group



**Terima kasih**